

merupakan milik masyarakat adat yang diatur oleh pemimpin adat berdasarkan aturan adat yang dianutnya. Pada sistem pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam kelompok marga menganggap bahwa tanah, hutan dan air adalah milik marga yang diwariskan turun-temurun pada suatu marga (klan). Sistem pemilikan tersebut menunjukkan bahwa ada dua tipe perolehan kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam di Papua, yaitu (1) berdasarkan penemuan pertama suatu wilayah oleh suku/marga tertentu dan (2) berdasarkan pewarisan kepada keturunan atau hibah. Mampioer (2002) dalam Patay (2005), menjelaskan bahwa suku atau marga yang pertama kali datang dan bermukim di suatu tempat dengan seluruh wilayah yang dijelajahnya menjadi milik suku/marga pemukim pertama tersebut. Mereka memiliki hak atas tanah dan seluruh sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Kelompok suku atau marga lain yang datang kemudian dan bermukim bersama pemukim pertama dapat memanfaatkan tanah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemukim pertama. Hak kepemilikan diperoleh melalui warisan, umumnya hak kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam diturunkan kepada anak laki-laki tertua. Pola ini hampir berlaku bagi seluruh suku yang ada di Papua termasuk wilayah kepala burung. Namun pada beberapa suku menurut Kuntjoroningrat (1996) pewarisan mengandung hukum ambilineal, yaitu anak laki-laki berhak atas tanah atau dusun milik ayah atau ibunya.

Seperti halnya dalam kepemimpinan adat, hak kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam yang saat ini berlaku adalah pola perwarisan kepada anak laki-laki tertua melalui hukum Patrilineal dan Ambilineal. Anak laki-laki tertua inilah yang akan menjadi ketua marga dan mengatur pembagian dan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang tersedia untuk keperluan hidupnya terutama untuk kegiatan meramu (ekstraksi sumberdaya alam) maupun pemanfaatan untuk kegiatan perladangan. Pada suku-suku di Kepala Burung Pulau Papua, pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam (tanah dan hutan) komunitas masyarakat adat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu :

#### **Melalui Warisan**

Pewarisan kepemilikan dan penguasaan lahan didasarkan pada silsilah keluarga atau keturunan. Hak pemilikan dan penguasaan sumberdaya diamanatkan dari leluhur ke anak sulung suatu marga. Pola pewarisan ini menganut kepemilikan dan penguasaan secara komunal oleh kelompok marga dalam satu keturunan.

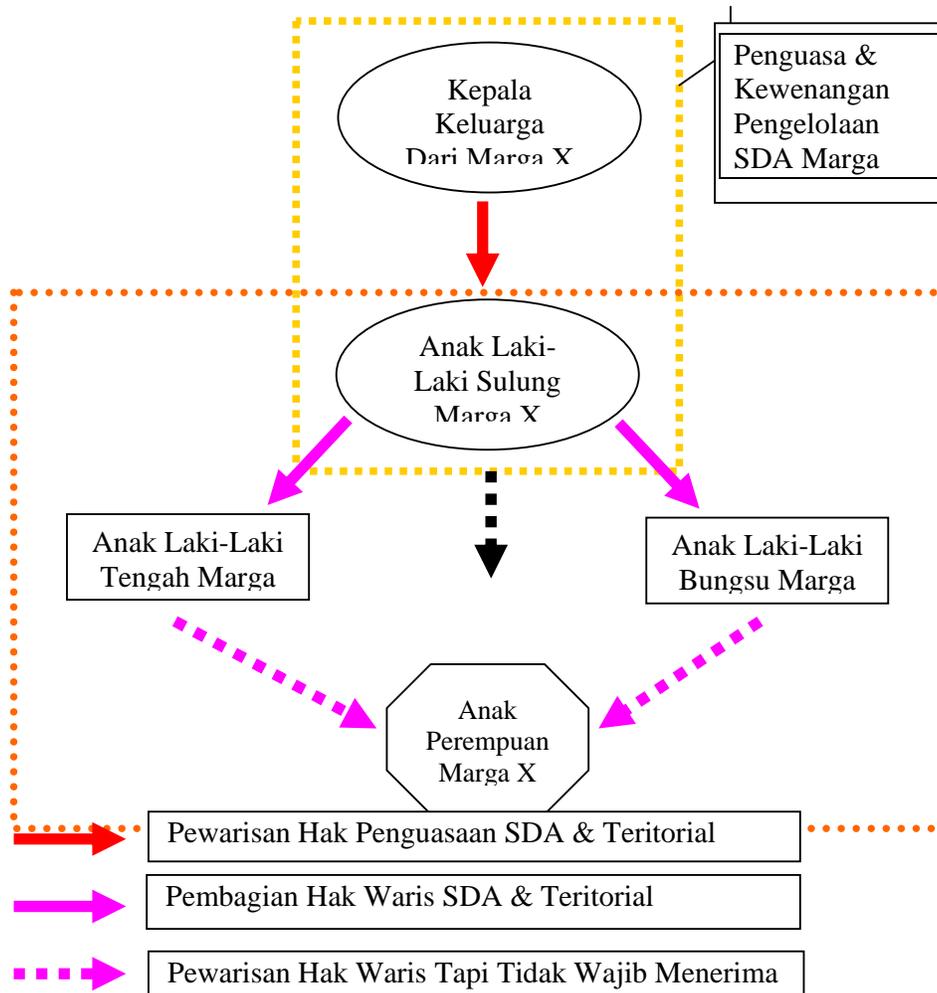
#### **Invasi ke Wilayah Kelompok Marga Lain**

Kepemilikan dan penguasaan suatu wilayah melalui invasi suatu marga ke wilayah teritorial marga lain dengan cara perang. Kelompok marga yang menang akan menguasai marga yang kalah termasuk berhak menguasai dan memiliki seluruh sumberdaya yang ada dalam wilayah teritorial marga bersangkutan.

#### **Ekspansi Marga Ke Wilayah Baru**

Kepemilikan dan penguasaan suatu wilayah melalui penjelajahan ke wilayah baru. Penjelajahan ini dilakukan bila pada wilayah pemukiman lama mengalami bencana. Wilayah pemukiman yang lama tetap menjadi wilayah teritorial kelompok marga yang melakukan migrasi dan mereka mencari wilayah baru sebagai tempat pemukiman yang aman. Perluasan wilayah juga terjadi karena pertikaian antar kelompok marga, sehingga marga yang yang terkucilkan menjelajah mencari wilayah baru sebagai tempat pemukiman baru. Khusus pada suku Biak memiliki kebiasaan Mengayau (perang dan mencari budak), mereka keluar untuk menguasai pulau-pulau di wilayah perairan Teluk Cenderawasih dan Kepulauan Raja Ampat.

Wilayah-wilayah yang dikuasainya menjadi milik suku mereka. Pola pemilikan dan penguasaan lahan melalui proses pewarisan seperti digambarkan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7. Pola Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Masyarakat Adat di Wilayah Kepala Burung Pulau Papua Melalui Pewarisan.

Pola pewarisan dan penguasaan sumberdaya secara tradisional tersebut saat sekarang telah dikacaukan oleh adanya perpindahan dan penggabungan kelompok marga ke dalam satu unit pemukiman. Pemilikan dan penguasaan tanah dan hutan tidak lagi mengikuti pola-pola tersebut di atas bahkan cenderung mengarah kepada kepemilikan dan penguasaan secara perorangan (kepemilikan keluarga marga di dalam kelompok marga). Perubahan ini yang menjadi sumber konflik dalam pemanfaatan hutan adat kelompok marga atau suku tertentu. Berlakunya UU No. 5 tahun 1960, tentang Pokok-Pokok Agraria, maka negara telah mengambil alih hak kuasa komunal komunitas adat atas sumberdaya alam yang mengubahnya menjadi hak kuasa negara. Ini menjadi akar konflik hak penguasaan atas sumberdaya alam di provinsi Papua. Konflik terus terjadi karena Negara yang diwakili oleh Pemerintah Pusat

memberikan berbagai izin pengelolaan hutan tanpa memperhatikan sistem penguasaan yang digunakan masyarakat adat. Pada era desentralisasi, khususnya Kehutanan, pengakuan akan Hak-Hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan telah diakomodir dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, namun dalam peraturan pelaksanaannya melalui PP. No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, tetap kuasa hak pengelolaan hutan masih dipegang pemerintah. Masyarakat masih diposisikan sebagai obyek pengelolaan hutan negara. Sebaliknya masyarakat hingga kini secara adat, tetap berpegang pada pemilikan dan penguasaan menurut hukum adat mereka, sehingga mereka pun tidak mengakui hak kuasa Negara atas sumberdaya hutan. Kedua pandangan inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pada era desentralisasi kehutanan ke depan.

### 2.2.5. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat (Community development) dapat diartikan sebagai kegiatan penguatan masyarakat untuk dapat memberdayakan diri dan kemampuan masyarakat untuk bisa hidup berkelanjutan. Berkaitan dengan konteks tersebut dibutuhkan beberapa komponen pendukung seperti di bawah ini.

#### A. Ketersediaan lembaga pemberdayaan masyarakat

Tabel 2.16. Keadaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Papua Barat

No	Kabupaten	Lembaga Swadaya Masyarakat	Pokok Kegiatan
1	Manokwari	Elsham Kontak (Lembaga Studi dan Advokasi HAM)	HAM
		LP3BH (Lembaga penelitian, pengkajian dan pengembangan bantuan hukum)	HUKUM
		MP2 (Mitra perempuan papua)	PEREMPUAN
		Perdu (Pengembangan masyarakat dan konversi alam)	Konservasi Alam
		Peduli Sehat	Kesehatan
		Yalhimo (Wi Ma Rawana)	Lingkungan Hidup
		YAPMI (Pengembangan Masyarakat Pribumi)	Pengembangan Masyarakat
2	Fakfak	Alfa Omega	Perempuan dan anak
		Lihupta (Lembaga bina prakarsa wirausaha dan musyawarah adat)	Wirausaha
		Mow Inin Kono	Pengembangan masyarakat
		Yalhi (Yayasan Sosial Pengembangan Kawasan Timur)	Lingkungan Hidup
		YBM (Yayasan Bina Mandiri)	Pengembangan Masyarakat
		YAMIKO	
		Yayasan Kasih Mulia	Sosial
Elpera (Lembaga Pemberdayaan ekonomi rakyat)	Ekonomi kerakyatan		
3	Kaimana	YPSM (Yayasan Pengembangan Suku Mairasi)	Sosial

		YATON (Yayasan Tunas Onim)	
4	Teluk Bintuni	USC. (Yayasan Kesatuan Kerjasama)	HAM
		Mitra Pesisir CRMP (Coral Resources Management Project)	Sumberdaya alam
		Perform project	
5	Sorong	ANIMO (Milik Kita)	PEMP
		Yayasan ECO	HAM dan Lingkungan Hidup
		Forum kajian pemberdayaan perempuan	Perempuan
		Lembaga Bantuan Hukum	Hukum, Ekonomi Kerakyatan
		Yayasan Sosial Agustinus	Kesehatan

Sumber : Laporan Perdu

Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu wadah memperdayakan masyarakat di Provinsi Papua Barat dapat berupa kelompok dan yayasan, dimana pengorganisasiannya dapat dilakukan dalam bentuk lembaga pemerintahan, lembaga kerohanian, lembaga perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat/LSM. Secara lengkap kondisi LSM di Provinsi Irian Jaya Barat disajikan pada tabel berikut.

Keberadaan Lembaga Swadaya masyarakat di Provinsi Papua Barat cukup banyak dimana LSM-LSM ini bergerak dalam bidang kajian tentang hukum, HAM, kesehatan, perempuan, kerohanian, sosial, sumber daya alam, lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan, dan pengembangan masyarakat.

Disamping LSM-LSM yang cukup tersedia, pihak pemerintahpun sebagai lembaga yang bertanggungjawab penuh terhadap pemberdayaan masyarakat juga bergerak melalui dinas-dinas terkait dalam penguatan pemberdayaan masyarakat seperti dinas kesehatan dinas sosial, dinas tenaga kerja dan berbagai dinas-dinas lainnya.

## B. Ketersediaan Tenaga Pembaharu Pembangunan (*Agent of change*)

Tenaga-tenaga *pembaharu/agent of change* merupakan sumber daya yang disiapkan untuk melakukan pendampingan untuk memberdayakan masyarakat. Tenaga-tenaga pembaharu ini pada setiap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah dipersiapkan dan ditugaskan di lokasi-lokasi dimana masyarakat bermukim. Kelompok LSM rata-rata memiliki daerah binaan dimana masyarakat yang diberdayakan dijadikan contoh dan atau kelompok-kelompok binaan yang dijadikan sasaran binaan.

Pada pihak pemerintah melalui dinas-dinas terkait juga telah menyiapkan tenaga-tenaga pendamping masyarakat yang ditempatkan di lokasi-lokasi pedesaan maupun kelompok-kelompok kerja. Tenaga pendamping masyarakat ini dapat ditemui pada tenaga penyuluh pertanian, tenaga-tenaga posyandu, penyuluh kesehatan, penyuluh kehutanan, maupun penyuluh perikanan.

### 2.2.6. Kapasitas Masyarakat

#### A. Kapasitas Pendidikan Masyarakat

Kapasitas pendidikan masyarakat dapat dilihat dari sebaran jumlah penduduk berdasarkan kelas umur yang disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Tahun 2005 Berdasarkan Kelas Umur

No.	Kelas Umur (tahun) .	Jumlah penduduk	Persen
1.	0-4	90.621	13,00
2.	5-12	141.926	20,36
3.	13 -15	42.940	6,16
4.	16-19	52.839	7,58
5.	20-25	83.654	12,00
6.	> 25	285.107	40,90
7.	Total Penduduk	697.082.	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat

Apabila ditinjau dari segi pendidikan berdasarkan kelas umur, maka 46,1% penduduk berada pada kelas umur sekolah baik pada tingkat SD (5-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun), SMU (16 - 19 tahun) dan perguruan tinggi (20 - 25 tahun). Presentase kelas umur sekolah lebih kecil dibandingkan penduduk yang berada pada kelas umur yang belum bersekolah (0 - 4 tahun) dan atau yang sudah selesai sekolah (> 25 tahun) yaitu sebesar 53,90%.

Kondisi penduduk yang berada pada kelas umur sekolah merupakan potensi sumber daya manusia yang harus mendapatkan layanan pendidikan paling tidak dalam layanan pendidikan dasar, namun berdasarkan data partisipasi sekolah ternyata penduduk yang berada dalam kelas umur sekolah tidak semuanya terlayani dalam pendidikan. Selengkapnya disajikan Pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Partisipasi Kasar Penduduk di Provinsi Papua Barat Tahun 2005

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk usia SD dan SMP (jiwa)	APK (%)		Belum akses (Jiwa)	
			SD	SMP	SD	SMP
1	Manokwari	43.094	79,39	79,27	6,83	2,08
2	Sorong	17.711	102,32	50,01	0	0
3	Raja Ampat	17.736	61,76	37,52	5,21	2,57
4	Teluk Bintuni	10.301	86,27	14,65	1,09	0
5	Kota Sorong	36.672	81,35	75,59	5,25	5,84
6	Sorong Selatan	23.812	78,07	38,85	4,01	3,38
7	Teluk Wondama	5.290	97,73	10,01	9,20	6,30
8	Fakfak	17.321	81,82	82,05	2,42	7,22
9	Kaimana	12.929	64,25	47,88	3,55	1,57
Papua Barat		181.866	80,19	76,51	2,84	11,54

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Prov. IJB

Berdasarkan Tabel 2.18 ternyata sebesar 28-427 jiwa (15,37%) anak usia 5 - 12 tahun di Provinsi Irian Jaya Barat yang belum mendapatkan akses pendidikan SD/MI, sedangkan untuk usia 13 - 15 tahun ternyata terdapat 11.541 (6,24) jiwa yang belum terpenuhi akses terhadap pendidikan SMP/MTs. Sehingga dapat dikatakan bahwa lebih banyak anak usia sekolah yang telah mendapatkan pendidikan, dan merupakan potensi sumber daya manusia.

Ditinjau dari segi angka partisipasi kasar (APK) baik pada tingkat SD/MI maupun SMP/MI masih memiliki APK yang relatif cukup tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan penduduk usia sekolah untuk mengenyam pendidikan dasar sebagai modal dasar pendidikan telah terpenuhi.

Apabila dilihat dari jumlah anak usia 16 - 19 tahun yang berhak memperoleh pendidikan pada jenjang SMU, SMK dan MA di Provinsi Papua maka ditemukan data bahwa sebanyak 23131 jiwa (43,77%) mendapatkan akses pendidikan sebaliknya sebanyak 29.708 jiwa (56-23%) yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada jenjang Pendidikan lanjutan setelah pendidikan dasar ternyata layanan pendidikan lebih banyak tidak dapat diakses oleh penduduk usia sekolah 16 - 19 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pada jenjang perguruan tinggi juga akan mengalami penurunan layanan pendidikan bagi usia 20 - 25 tahun.

## B. Kapasitas Sarana dan Tenaga Pengajar

Sarana dan tenaga pengajar pendidikan merupakan kapasitas yang mendukung proses belajar mengajar dalam kegiatan pendidikan. Keadaan sarana dan tenaga pengajar di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 2.19

**Tabel 2.19. Sarana dan Tenaga Pengajar di Provinsi Papua Barat Tahun 2005**

No.	Komponen	Jenjang Pendidikan			Jumlah
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	
1.	Sarana (buah)	806	150	72	1.028
2.	Guru (Jiwa)	5.409	2.058	1576	9.043

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Papua Barat

Sarana pendidikan di Provinsi Papua Barat mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi telah tersedia, dan telah tersebar pada daerah kabupaten dan kota di wilayah ini. Khusus untuk sarana pendidikan dengan jenjang pendidikan SMK sebagai jenjang kejuruan yang lebih menekankan pada profesionalisme ilmu belum tersebar pada semua kabupaten/kota, dimana terdapat 3 (tiga) lokasi kabupaten yang belum memiliki jenjang SMK yaitu kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Raja Ampat, sebaliknya untuk kota Sorong memiliki jenjang sekolah SMK yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu sebanyak 7 sekolah.

Perbandingan kapasitas guru tersedia dan siswa pada jenjang pendidikan SD/MI diperoleh nilai sebesar 5.409 : 113.815 atau 1: 21. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 1(satu) orang guru akan mengajar siswa jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 21 orang. Pada tingkat SMP/MTs diperoleh perbandingan kapasitas guru dan siswa sebesar 2.058 : 32.853 atau 1:16. Artinya bahwa 1(satu) orang guru pada tingkat SMP/MTs akan mengajar 16 siswa. Apabila dilihat dari perbandingan kapasitas guru dan siswa didik, ternyata memiliki perbandingan yang cukup baik dalam proses belajar mengajar.

Jenjang pendidikan perguruan tinggi yang tersedia di Provinsi Papua Barat terdiri dari Universitas Negeri Papua/UNIPA, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum/STIH, STIE Maesa, SIT Otouw Gesler, Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian/STPP (Kabupaten Manokwari), Universitas Kristen

Indonesia Papua /UKIP, Sekolah Pendidikan Agama Kristen/SPAK, Universitas Muhamadiyah Alamin/UNAMIN (Sorong), Sekolah Tinggi Viktoria, Saint Paul Politeknik, STIE Sorong (Kabupaten Sorong).

### C. Kapasitas Sistem Kekerabatan Dalam Masyarakat

Penduduk yang berdomisili di Provinsi Papua Barat berasal dari (1) suku besar Arfak, suku Doreri (Kab. Manokwari); (2) suku Ayamaru, Aitinyo, Aifat (Kota Sorong, Kab. Sorong); (3) Suku Teminabuan (Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong Selatan); (4) Suku Wamesa, Moskona, Sebyar (Kab. Teluk Wondama, Kab. Bintuni).

Pengelompokan suku-suku bangsa tersebut hingga kini telah membaaur antar satu kelompok suku dengan suku lainnya, dikarenakan sistem perkawinan yang bersifat terbuka. Artinya bahwa satu kelompok dapat melakukan perkawinan keluar dengan kelompok suku bangsa lainnya, namun dalam pemberian fam sebagai salah satu tanda ikatan hubungan kekerabatan yang diberikan kepada keturunan-keturunan yang baru lahir didasarkan pada sistem patrilineal, yaitu suatu ikatan kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki (Bapak).

Pemberian mas kawin berupa kain timor, piring, maupun "kain cita" sebagai mas kawin yang umumnya dipakai dalam suku-suku bangsa di wilayah provinsi Papua Barat merupakan wujud ikatan hubungan kekerabatan dimana hubungan kekerabatan ini akan membentuk kelompok-kelompok kekerabatan yang lebih kecil dalam bentuk keluarga-keluarga inti yang mana keluarga-keluarga inti-inti memiliki identitas fam yang sama.

Adanya ikatan kekerabatan melalui perkawinan disamping mempercepat ikatan hubungan kekerabatan antar kelompok-kelompok kekerabatan secara garis keturunan (genetik), namun juga saling mendukung di dalam aktifitas sosial misalnya pembiayaan pendidikan. Hubungan kekerabatan yang sangat menonjol dalam kegiatan mendukung aktifitas sosial di bidang pendidikan ditemui pada kelompok kekerabatan suku A3 (Ayamaru, Aitinyo dan Aifat) dimana pembiayaan pendidikan dapat ditanggung oleh keluarga-keluarga didalam satu ikatan kekerabatan untuk menyekolahkan anggota-anggota kekerabatan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini nampak terlihat adanya saling membantu (gotong royong) antar keluarga-keluarga di dalam meringankan beban biaya pendidikan yang bukan hanya menjadi tanggungan keluarga inti.

### D. Kapasitas Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, dimana norma-norma, kaidah-kaidah, nilai-nilai yang turun temurun diyakini sebagai suatu nilai yang dianggap benar ataupun, salah untuk diyakini dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat terdapat banyak sekali kepercayaan yang masih dianut dan dipegang oleh masyarakat di dalam kehidupannya. Salah satu kepercayaan yang menonjol yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan masyarakat adalah pemberlakuan "Sistem Sasi". Sistem Sasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelarangan yang dilakukan sebagai upaya pengaturan dan pengawasan dalam memanfaatkan maupun mengelola sumber daya dengan jalan menentukana batas waktu tertentu untuk pengambilan hasil sumber daya tersebut. Sistem Sasi merupakan bagian

dari adat istiadat (tradisi) yang telah dilakukan turun temurun juga berfungsi sebagian bagian dari aturan kampung yang telah ditetapkan oleh suatu kelompok masyarakat.

Walaupun sistem sasi pada saat dahulu lebih mengarah pada saat dahulu lebih mengarah pada segi budaya namun kondisi sekarang sistim sasi ternyata juga mempertimbangkan nilai ekonomi dan ekologi. Nilai ekonomi dari sistim sasi dapat dilihat dari pembatasan pengambilan produksi pada suatu tanaman akan melindungi tanaman tersebut. Pada kenyataannya sistim sasi dilakukan dalam penetapan waktu tertentu dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Sistim sasi berlaku pada tanaman kelapa, tanaman-tanaman jangka panjang maupun terhadap kebun serta hasil laut. Pada saat ini sistim sasi yang sangat kuat di pegang dan dijalankan oleh masyarakat di Provinsi Papua Barat berada pada Kabupaten Fak-fak dan Kaimana, dimana sistim sasi ini terjadi pada tanaman-tanaman potensial kedua wilayah ini yaitu tanaman kelapa, durian maupun pala. Pelaksanaan sistim sasi sebagai bagian dari kebudayaan (kepercayaan) memiliki kemampuan dapat mengikat seluruh masyarakat untuk ikut terlibat serta mentaati aturan yang berlaku. Pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan aturan sasi biasanya kepala kampung, para tetua adat dan pemuka masyarakat, masyarakat setempat.

#### E. Kapasitas kesehatan Masyarakat

Kapasitas kesehatan yang tersedia di wilayah Papua Barat dapat ditelusuri melalui sumberdaya manusia sarana dan prasarana gedung. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.20. Kapasitas Sumberdaya Manusia di bidang Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2005.**

No	Kabupaten	Dokter	Dokter Ahli	Perawat	Bidan
1	Manokwari	19	4	345	0
2	Teluk Wondama	2	0	33	2
3	Sorong	31	12	222	147
4	Raja Ampat	2	0	164	0
5	Fakfak	21	9	155	97

Sumber : BPPS Papua

Ketersediaan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan yang cukup tinggi pada lokasi Kabupaten Manokwari, Sorong dan Fakfak. Hal ini dapat dipahami karena lokasi-lokasi tersebut merupakan kabupaten lama (Provinsi Papua) sebelum pemekaran wilayah menjadi Provinsi Irian Jaya Barat. Kapasitas sarana prasarana gedung di bidang kesehatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.21. Kapasitas Sarana Prasarana DiBidang Kesehatan Provinsi Papua Barat**

No.	Kabupaten	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Posyandu
1.	Manokwari	2	70	73	189
2.	Teluk Wondama	0	2	8	24
3.	Sorong	3	8	40	**
4.	Raja Ampat	0	1	2	**
5.	Fakfak	1	8	38	**

Sumber : BPPS Papua

## 2.3. Sosial Ekonomi

### 2.3.1. Keadaan Makro Ekonomi

Kondisi perekonomian makro Provinsi Papua Barat pada saat ini ditunjukkan melalui beberapa variabel antara lain : nilai PDRB, Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Pendapatan per Kapita.

#### *Produk Domestik Regional Bruto*

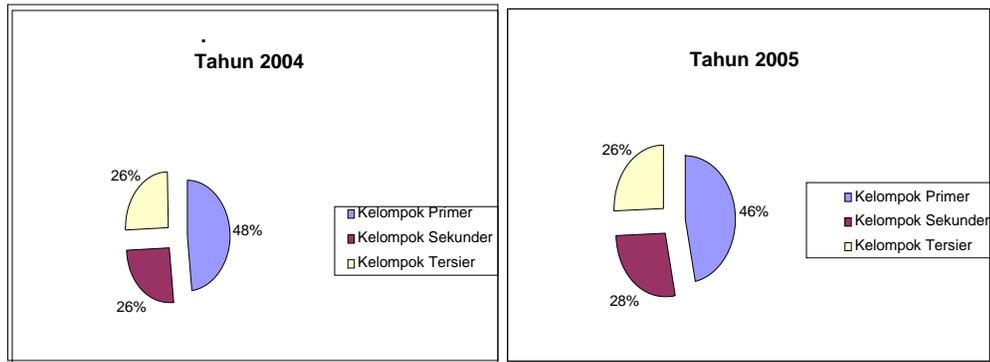
Perekonomian Papua Barat selama tahun 2000 - 2005 berkembang cukup spektakuler. Pada tahun 2005 PDRB atas dasar harga berlaku (ADH<sub>B</sub>) mencapai 7,9 triliun rupiah. Nilai PDRB ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2000. Demikian pula PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADH<sub>K-2000</sub>) mengalami perkembangan yang positif. Indeks perkembangan PDRB ADH<sub>K-2000</sub> pada tahun 2005 meningkat menjadi 134% dari tahun 2000.

PDRB ADH<sub>B</sub> Papua Barat rata-rata berkembang sebesar hampir 20% pertahun, sementara PDRB ADH<sub>K-2000</sub> rata-rata berkembang 6,8% pertahun. Angka ini relatif cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa secara agregat perekonomian di Papua Barat sudah mulai bangkit dari keterpurukan sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi pada paroh kedua tahun 1997.

Secara nasional sektor pertambangan, terutama minyak dan gas bumi (migas) mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kendati demikian, tidak semua daerah menjadi penghasil migas. Demikian pula dengan Papua Barat. Selama tahun 2004 dan 2005, produksi migas serta industri pengolahannya menyumbang lebih dari 20% terhadap perekonomian Papua Barat. Kedepan sumbangan dari sektor ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan ketika BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni telah berproduksi pada tahun 2008. Untuk dapat memperbandingkan perkembangan ekonomi Papua Barat dengan daerah-daerah lain, berikut dikemukakan keadaan ekonomi Papua Barat tanpa produksi migas.

#### *Struktur Perekonomian Daerah*

Struktur perekonomian Papua Barat sangat dipengaruhi oleh besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi dalam membentuk nilai PDRB. Data BPS Provinsi Papua Barat memperlihatkan bahwa struktur perekonomiannya masih didominasi oleh kelompok sektor primer, yaitu sektor pertanian dan pertambangan & penggalian. Kelompok sektor primer ini menyumbang hampir separoh PDRB ADH<sub>B</sub>, yaitu 47,95% pada tahun 2004 dan sedikit menurun menjadi 46,58% pada 2005. Kelompok sektor sekunder, yaitu sektor-sektor industri pengolahan, listrik dan air bersih serta bangunan menyumbang 26,04% pada tahun 2004, dan naik menjadi 27,65% pada tahun 2005.



**Gambar 2.8. Struktur Perekonomian Papua Barat Menurut Kelompok Sektor**

Kelompok sektor tertier, yaitu sektor-sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa serta jasa-jasa lain menyumbang 26,01% pada tahun 2004 dan sedikit menurun menjadi 25,76% pada tahun 2005.

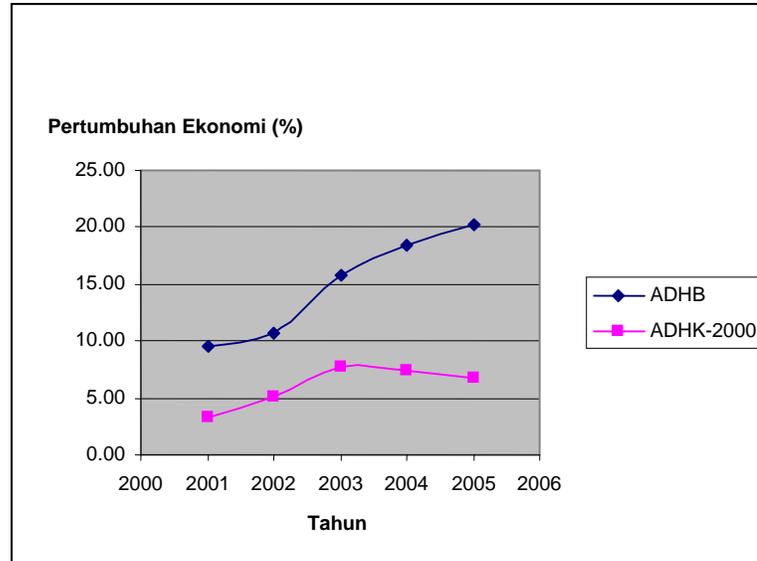
Berdasarkan kontribusi menurut masing-masing sektor ekonomi, sektor pertanian masih sebagai penyumbang terbesar yaitu sebesar 27,24% terhadap perekonomian Papua Barat pada tahun 2005. Kendati demikian, sejak tahun 2001 peranan sektor pertanian terus mengalami penurunan. Ada fenomena yang menarik dalam struktur perekonomian di Provinsi Papua Barat, yaitu dominasi subsektor kehutanan dan subsektor perikanan tangkap dalam membentuk nilai tambah sector pertanian. Artinya, sektor pertanian di Papua Barat masih mengandalkan kegiatan produksi yang sifatnya ekstraktif terhadap sumberdaya alam yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar. Sementara itu kegiatan-kegiatan produksi pertanian yang bersifat budidaya dan berorientasi agribisnis serta melibatkan petani/nelayan belum berkembang. Karena petani/nelayan merupakan bagian terbesar pelaku ekonomi, oleh karenanya kemiskinan masih merupakan isu yang menonjol di Papua Barat. Pengembangan sektor pertanian yang berorientasi agribisnis selain berpengaruh terhadap peningkatan PDRB juga akan membuka kesempatan kerja yang pada gilirannya akan mengurangi angka kemiskinan.

Sektor industri pengolahan menempati urutan kedua dalam pembentukan PDRB Papua Barat yaitu sebesar hampir 20% PDRB pada tahun 2005. Tingginya peranan industri pengolahan ini lebih disebabkan adanya peningkatan nilai tambah pada subsektor industri migas yang mencapai 12,83% dari nilai tambah sektor ini. Ini berarti sumbangan sector industri pengolahan tanpa subsektor industri migas hanya sebesar 7,17%. Seperti kita ketahui, bahwa subsektor industri migas ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan bersifat "enclave". Artinya, sector ini menciptakan kantong-kantong kegiatan ekonomi yang secara makro berpengaruh besar terhadap perekonomian Papua Barat tetapi kurang menyentuh perekonomian rakyat. Kondisi ini berpotensi pada melebarnya kesenjangan pendapatan dan meluasnya kemiskinan.

### *Pertumbuhan Ekonomi*

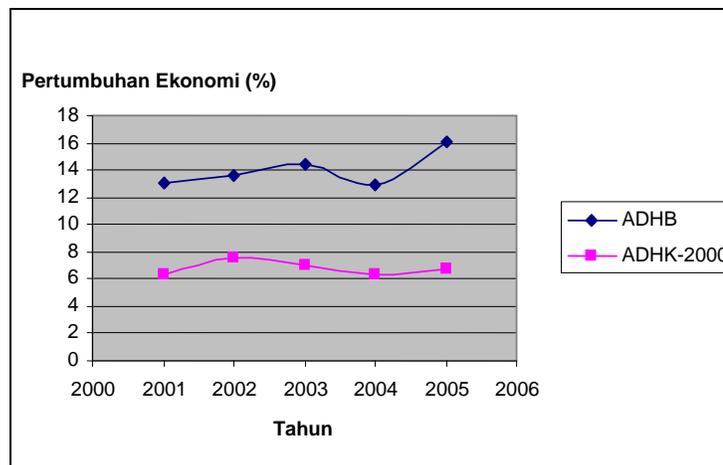
Selama kurun waktu 2000 – 2005, perekonomian Papua Barat memiliki laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan harga berlaku pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mencapai rata-rata hampir 15% pertahun. Sementara itu pertumbuhan secara riil dalam kurun waktu yang sama rata-rata mencapai 6% pertahun.



Gambar 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Termasuk Migas Tahun 2000-2005

Kendati perekonomian Papua Barat sangat ditentukan oleh sektor pertambangan terutama migas, namun pertumbuhan ekonomi tanpa migas masih menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 2000 – 2005 pertumbuhan ekonomi ADH<sub>B</sub> Papua Barat tanpa migas rata-rata mencapai hampir 14% per tahun, sementara pertumbuhannya riilnya mencapai rata-rata 6,8% pertahun.



Gambar 2.10. Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Tanpa Migas Tahun 2000-2005.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat dibentuk oleh sembilan sektor ekonomi yang ada dengan kontribusi yang beragam. Berdasarkan data BPS Papua Barat (2005), tiga besar sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Papua Barat adalah : sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.22 Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Sektor Tahun 2000 - 2005

No.	Sektor	2004	2005	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian	3,91	2,09	3,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,54	5,34	3,94
3.	Industri pengolahan	21,77	8,36	15,06
4.	Listrik dan Air Bersih	8,83	9,65	9,24
5.	Bangunan	6,26	12,75	9,51
6.	Perdag. Hotel dan Restoran	7,03	8,97	8,00
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	10,13	12,75	11,4
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	30,34	2,97	16,66
9.	Jasa-jasa	7,61	13,19	10,40

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat. 2005.

Peranan masing-masing sector dalam pertumbuhan ekonomi riil Papua Barat tahun 2005 dikemukakan pada table berikut.

Tabel 2.23 Kontribusi Sektor Terhadap Pertumbuhan PDRB ADH Konstan Provinsi Papua Barat Tahun 2005

No.	Sektor	Pertumbuhan ADH Konstan 2000	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian	0,65	9,64
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,12	16,62
3.	Industri pengolahan	1,16	17,21
4.	Listrik dan Air Bersih	0,04	0,59
5.	Bangunan	0,86	12,76
6.	Perdag. Hotel dan Restoran	0,84	12,46
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,79	11,72
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,05	0,74
9.	Jasa-jasa	1,23	18,25
Pertumbuhan PDRB		6,74	100,00

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat. 2005.

### *PDRB Per Kapita*

Pendapatan per kapita dihitung berdasarkan total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun, merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Pendapatan per kapita ADH Berlaku tahun 2000 sebesar Rp. 6.944.400,- dan pada tahun 2005 berkembang 177% menjadi Rp. 12.296.072.

Tabel 2.24 PDRB Perkapita Provinsi Papua Barat ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2000 - 2005

Tahun	ADH Berlaku (Rupiah)	Perkembangan (%)	ADH Konstan (Rp.)	Perkembangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	6.944.440,44	100,00	6.944.440,44	100,00
2001	7.577.265,77	109,11	7.151.895,24	102,99
2002	8.355.797,46	120,32	7.486.472,87	107,81
2003	9.627.200,06	138,63	8.018.686,81	115,47
2004	10.770.790,10	155,10	9.597.764,45	138,21
2005	12.296.072,01	177,06	8.252.473,44	118,84

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat. 2005.

Perkembangan pendapatan perkapita ADH Konstan secara umum mengalami peningkatan sebesar 118,84% selama kurun waktu 2000 – 2005. Kendati demikian, perkembangan pendapatan riil perkapita ini mengalami fluktuasi. Dari tahun 2000 – 2004, perkembangan pendapatan riil mencapai 138,21% kemudian tahun 2005 mengalami penurunan. Dari sisi nilai pendapatan perkapita sebesar Rp. 799.813,- perbulan dapat dikatakan cukup besar bahkan jauh di atas upah minimum regional Papua Barat yang merupakan pemenuhan kebutuhan fisik minimum. Permasalahannya terletak pada distribusi pendapatan yang tidak merata.

Data BPS Papua Barat mengindikasikan adanya distribusi pendapatan yang sangat timpang di kalangan penduduk, baik antar sector, antar daerah pedesaan dan perkotaan maupun antar wilayah kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan menjadi isu sentral di Papua Barat. Secara umum penduduk miskin di Papua Barat berada di sector-sektor primer (terutama petani dan nelayan), sebagian besar berada di wilayah pedesaan dan di kabupaten-kabupaten yang baru dimekarkan.

Proporsi rumahtangga miskin pada kabupaten-kabupaten baru sangat tinggi, yaitu mencapai angka di atas 90% kecuali Kabupaten Kaimana. Kabupaten-kabupaten lama proporsi rumahtangga miskin terhadap jumlah rumahtangga juga masih mencapai angka di atas 70%. Hanya Kota Sorong proporsi rumahtangga miskin terhadap jumlah rumahtangga relative paling rendah.

Tabel 2.25 Jumlah Rumahtangga Miskin Di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005/2006

Kabupaten/Kota	Rumahtangga Miskin		
	<i>Jumlah Rumah tangga</i>	<i>Jumlah Rumahtangga Miskin</i>	<i>Persentase Rumahtangga Miskin</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. FakFak	15.272	11.379	74,51
2. Kaimana	9.311	6.978	74,94
3. Teluk Wondama	4.052	3.778	93,24
4. Teluk Bintuni	9.406	8.980	95,47
5. Manokwari	56.160	43.773	77,94
6. Sorong Selatan	12.719	11.856	93,21
7. Sorong	18.647	15.802	84,74
8. Raja Ampat	6.823	6.259	91,73
9. Kota Sorong	37.659	19.351	51,38
<b>Papua Barat</b>	<b>170.049</b>	<b>128.156</b>	<b>75,36</b>

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat. 2006.

### 2.3.2. Perekonomian Rakyat

#### Sektor Pertanian dan Agribisnis

Sektor agribisnis merupakan kegiatan usaha yang berbasiskan pada sektor pertanian. Peranan utama sektor pertanian, dalam kebijaksanaan makro nasional difokuskan pada penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan regional dalam rangka menunjang stok pangan nasional. Tugas pokok dan fungsi sektor pertanian urutan berikutnya adalah menyediakan bahan baku untuk mendukung pengembangan sektor industri. Strategi dasar pengembangan sektor agribisnis di Papua Barat dimulai dengan pengembangan sektor pertanian yaitu: Pengembangan sektor pertanian dengan pendekatan agribisnis, berbasiskan pada usahatani lahan kering, yang berwawasan lingkungan.

#### *a. Perkebunan (kelapa, kakao, cengkeh, pala, dan kelapa sawit);*

Produksi kelapa (kelapa buah) sangat tinggi mencapai 52,35% luas panen. Kelapa tumbuh hampir merata di semua wilayah Papua Barat terutama wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir, wilayah pantai dan dataran rendah. Buah kelapa belum diolah secara intensif terutama untuk menghasilkan minyak goreng skala perusahaan, namun baru dimanfaatkan secara kecil-kecilan dan yang paling banyak adalah pemanfaatan santan kelapa untuk kebutuhan rumah tangga. Di Kabupaten Kaimana dan Fakfak buah kelapa dibiarkan menumpuk dalam jumlah yang sangat banyak di bawah pohon kelapa.

Produksi kopi dan cengkeh mencapai 5,99% dari luas panen Komoditas ini kalau dikembangkan lebih intensif akan memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar karena memiliki nilai jual yang tinggi. Sedangkan komoditas perkebunan lain seperti pala dan karet tersebar tidak merata terutama di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

Produksi biji kakao dihasilkan melalui perkebunan rakyat yang dikembangkan sendiri oleh rakyat dan pihak swasta. Perkebunan rakyat terkonsentarsi di Kabupaten Manokwari

seperti di sekitar Oransbari, Ransiki, Warmare dan Prafi. Perusahaan swasta yang mengembangkan tanaman kakao seperti PT Cokran di Ransiki Manokwari (lebih dari 20.000 ha), dan PT. Nusa Irian Indah di Babo/Bintuni seluas 5.000 ha dari lahan yang belum dimanfaatkan seluas 59.500 ha. Diharapkan biji kakao dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang mengolah biji kakao menjadi coklat bubuk.

Produksi kelapa sawit yang menghasilkan CPO terdapat di Kabupaten Manokwari oleh PTP Nusantara II saat ini sudah mencapai 10.000 ha sedang memproduksi dan dilakukan pembukaan lahan baru seluas 17.000 ha. Sementara itu, Di Babo Kabupaten Teluk Bintuni akan dibangun kebun kelapa sawit seluas 90.000 ha oleh PT Varita Majutama. Saat ini luas lahan yang sudah ditanami mencapai 5.000 ha. Berdasarkan data yang dihimpun, ternyata masih tersisa luasan lahan yang belum dimanfaatkan yaitu 159.500 ha yang potensial untuk beberapa jenis komoditi perkebunan. Pengolahan biji sawit masih pada tahap pengolahan produk crude palm oil (CPO).

#### ***b. Peternakan (sapi dan babi)***

Ternak unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan oleh masyarakat adalah ternak sapi. Ternak sapi menjadi komoditi primadona karena permintaan sapi potong di semua RPH terus mengalami peningkatan. Meskipun aturan larangan pemotongan ternak sapi muda betina produktif ditegakkan, namun terus saja terjadi pelanggaran pemotongan. Disamping itu, permintaan akan daging sapi terus meningkat sebagai konsekuensi dari mobilitas penduduk yang tinggi ke wilayah Papua Barat sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan meningkatnya sadar gizi dari sebagian besar masyarakat.

Manfaat ternak sapi dari segi ekonomi ternyata menempati urutan teratas dibandingkan jenis ternak lain. Ternak sapi kalau dijual harganya sangat tinggi, dan kalau dipelihara resiko kematian sangat rendah sehingga dapat dijadikan tabungan keluarga yang sewaktu-waktu dijual untuk mendapatkan uang *cash*. Dalam pemeliharaannya, ternak sapi membutuhkan sejumlah input yang murah dan tidak bersaing dengan manusia dalam memperoleh makanan. Saat ini ternak sapi sedang mengeser fungsi dari (ternak babi, kain Timor dan piring) sebagai mas kawin, atau alat bayar denda lainnya terutama di Kabupaten Manokwari.

Di wilayah Papua Barat ketersediaan hijauan melimpah dengan hamparan padangan yang luas. Persediaan pakan alternatif seperti lumpur sawit, kulit buah kakao dan limbah pertanian ternyata sangat banyak. Berikut ini ditunjukkan potensi hijauan makan ternak (HMT), potensi ternak dan peluang membangun breeding centre di Papua Barat berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat.

Ternak babi masih menjadi komoditi andalan karena memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat asli Papua. Oleh sebab itu, jenis ternak ini masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai ternak unggulan spesifik lokalita Papua. Disamping itu, produksi sapi bakalan dapat diarahkan untuk usaha penggemukan sapi (*fattening*) dalam rangka tercapainya swasembada daging secara nasional pada tahun 2010.

Selain itu, tercapainya swasembada daging menjadi pemicu dibangunnya pabrik pengalengan daging apakah di Manokwari atau di Sorong.

### c. Tanaman pangan (padi dan tanaman pangan lainnya)

Potensi pengembangan komoditas tanaman pangan di Papua Barat sangat besar terutama dilihat dari produktifitas lahan dan produktifitas jenis tanaman. Peluang untuk meningkatkan produktifitas lahan dan produktifitas jenis tanaman masih dapat ditingkatkan apabila diberikan sentuhan teknologi di dalamnya, namun akan menambah biaya input. Persoalannya adalah apakah setiap jenis komoditas pertanian yang dihasilkan dapat diserap oleh pasar? Mengingat sistem kelembagaan pemasaran belum tertata dengan baik dan belum disertai kebijakan pemerintah yang memiliki keberpihakan kepada petani.

Sebagai misal, produksi kacang tanah dari Kebar tidak dapat dipasarkan secara kontinu ke Kota Manokwari karena kalah bersaing dengan kacang tanah impor dari Surabaya; sayur kubis, wortel dan kentang dari Anggi yang (*non pesticide*) kalah bersaing dengan sayur kubis, wortel dan kentang dari Manado yang (*pesticide*). Jadi sistem agribisnis akan berkembang apabila didukung dengan perangkat sub sistem agribisnis yang kuat, juga disertai dukungan prasarana dan sarana serta pembinaan kelembagaan termasuk kebijakan pemasaran.

Peluang investasi agribisnis di Papua Barat diuraikan sebagai berikut :

- Penyediaan alat-alat dan sarana produksi pertanian khususnya untuk pengembangan komoditas unggulan;
- Sementara itu pendirian industri pengolahan dapat dilakukan oleh swasta dengan harapan hasil-hasil pertanian dapat menjangkau pasar dan segmen konsumen yang lebih luas;
- Pendirian pusat pembibitan komoditas unggulan dapat dilakukan oleh investaor swasta maupun pemerintah.

Komoditas agribisnis identik dengan sector pertanian. Berdasarkan karakteristik masing-masing komoditas dapat dikelompokkan ke dalam 5 subsektor, yaitu : tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

#### Kelautan dan Perikanan

Luasnya wilayah laut dan perairan di Papua Barat menyebabkan wilayah ini memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Potensi ikan yang tersedia dan tersebar di Laut Arafuru khususnya di perairan dekat Kabupaten Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana mencapai 799.566 ton, sedangkan yang baru dimanfaatkan sebanyak 273.756 ton atau baru mencapai 35,87 %.

Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk berbagai jenis ikan masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Sumberdaya laut lainnya di Papua Barat seperti ikan kakap putih, kakap merah, kakap hitam, kerapu, bawal hitam, bawal putih, manyung, teri, kembung, tenggiri, sirip hiu, kepiting, cumi-cumi dan rumput laut.

Ironisnya, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa sektor perikanan dan kelautan belum bisa mengangkat kehidupan masyarakat nelayan. Malahan, perlu kiranya melakukan kajian lebih mendalam dari aspek efisiensi karena hampir semua usaha penangkapan dan pengolahan ikan yang ada di Papua Barat sedang mengalami penurunan aktifitas produksi, bahkan terdapat beberapa diantaranya sudah tidak beroperasi.

Pemanfaatan potensi bisnis kelautan merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat Papua Barat bagian selatan yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat bagian utara. Permasalahannya, pengembangan komoditas kelautan ini berkaitan dengan investasi yang dibutuhkan untuk satu satuan usaha memerlukan dana yang sangat besar, sehingga tidak akan terjangkau oleh para petani/nelayan yang selama ini bergerak dibidang yang bersangkutan. Disamping permasalahan tersebut prasarana yang tersedia, seperti pelabuhan dan prasarana transportasi masih minim, akibatnya komoditas yang dihasilkan sulit untuk menjangkau pasar.

### Sektor Pertambangan

Pembangunan dan pengembangan sektor pertambangan diarahkan sepenuhnya pada upaya pengelolaan sumberdaya pertambangan yang efektif dan efisien, berwawasan lingkungan serta diarahkan sepenuhnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan.

Peluang investasi di sektor pertambangan adalah mendirikan industri hilir di wilayah Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat memiliki potensi bahan galian dan mineral industri.

Potensi tambang terbesar di Papua Barat terutama menghasilkan minyak bumi dan gas alam (migas). Perusahaan pertambangan terbesar akan dibangun di Bintuni, namun membutuhkan modal besar untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. LNG Tangguh (Bintuni) saat ini sedang dalam tahap konstruksi dan diperkirakan pada tahun 2009 sudah akan beroperasi. Beberapa perusahaan lain seperti di Sorong melakukan penambangan baik minyak mentah maupun gas alam.

Diharapkan dengan berlangsungnya kegiatan penambangan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi, sehingga memberikan efek multiplier yang besar seperti penyerapan tenaga kerja, meningkatnya kebutuhan akan barang primer, membuka daerah terisolasi dengan membuka dan membangun jalan, terbukanya pasar sehingga pertumbuhan ekonomi daerah menjadi meningkat.

### Sektor Pariwisata

Peran sektor pariwisata dalam perekonomian Provinsi Papua Barat, belum menunjukkan kontribusi yang proporsional dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Kontribusi sektor pariwisata Provinsi Papua Barat terhadap PDRB masih jauh dari harapan.

Sektor pariwisata di Papua Barat merupakan sektor andalan diharapkan di masa depan akan menjadi *leading sector*. Kegiatan pariwisata yang potensial seperti Wisata Alam, Wisata Bahari, Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Keagamaan. Beberapa diantaranya seperti Hutan Cagar Alam Pegunungan Arfak (68,325 ha), Cagar Alam Pegunungan Tamrau Selatan (435.776 ha), Hutan Suaka Margasatwa Pantai Mubrani-Kaironi (170 ha), Suaka Margasatwa Pantai Sidey-Wabian (157 ha). Terdapat juga objek wisata yang belum dikembangkan seperti objek wisata Danau Anggi, Danau Kabori, Gunung Meja dan Air Panas di Kebar dan masih banyak objek wisata lainnya yang belum digali. Informasi lebih rinci seperti ditunjukkan pada Tabel 2.26 berikut.

Secara makro sektor pariwisata merupakan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui: penyediaan kesempatan kerja, peningkatan

pendapatan dan taraf hidup, serta secara simultan dapat mengaktifkan sektor-sektor produksi lain, sehingga pariwisata sering disebut lokomotif perekonomian.

Tabel 2.26. Potensi Pariwisata Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005

Jenis Wisata	Obyek dan Daya Tarik Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)
Alam dan Budaya	Cagar Alam Pegunungan Arfak, Tamrau Selatan, Suaka Margasatwa Pantai Mubrani-Kaironi, Suaka Margasatwa Pantai Sidey-Wabian, Danau Angi, Danau Kabori, Permandian Air Panas, Gunung Meja, Makam Missionaris Kristen Pertama di Papua, Rumah 1.000 tiang, kupu-kupu bersayap burung,	Kabupaten Manokwari (Distrik Kebar, Minyambouw dan Susurey)
Alam dan Bahari	Taman Laut Nasional Teluk Cenderawasih, Cagar Alam Wondibu, Pantai Pasir Putih, dan Terumbu Karang	Kabupaten Teluk Wondama (Distrik Wasior, Windesi, Wasior Selatan dan Wasior Barat)
Alam, Budaya dan Sejarah	Cagar Alam Pegunungan Arfak Bagian Selatan, Sumur Minayk Peninggalan NNGPM, Peninggalan Sejarah Perang Dunia II	Kabupaten Teluk Bintuni (Distrik Babo dan Timbuni)
Alam	Cagar Alam Markoor, Cagar Alam Jamusaba, Cagar Alam Wowo, Pantai Sausapor, aman Wisata bariat, Taman Wiata Klasman, Taman Wisata Klamono, Pulau Buaya, Kayeli Hot Water Spring	Kabupaten Sorong (Distrik Makbon, Berau, Moraid, Sausapor, Salawati, Klamono, Klasaman).
Alam dan Budaya	Pantai Tanjung Kasuari, Munumen Arfak, Monumen Indonesia-Jepang	Kota Sorong dan sekitarnya
Alam dan Budaya	Danau Ayamaru, Air Terjun Sungai Karon, Monumen PEPERA	Kabupaten Sorong Selatan
Alam dan Bahari	Cagar Alam Missol, Cagar Alam Pulau Waigeo, Cagar Alam Batanta Barat, Pulau Shop, Pulau Matan, Pulau Kafiau, Pantai Peneluran Penyu	Kabupaten Raja Ampat
Alam dan Budaya	Gua Jepang, Fosil Telapak Tangan, Masjid tertua di Tanah Papua, Monumen PEPER, Monumen Perang Dunia II, Terumbu Karang, Pantai Pasir Putih Panjang, Pulau Ega dan Karas	Kabupaten Fakfak (Distrik Fakfak Timur dan Barat)
Alam Bahari dan Budaya	Cagar Alam Gunung Kumawa, Cagar Alam Gunung Genefo, Cagar Alam Gunung Karora, Cagar Alam Gunung Fudi TMP Trikora, Pantai Pasir Putih, Pulau Adi, Pulau Penyu, Pulau Kilimata, Danau Yamor, Danau Siwiki, Benteng Fort Du Bois, Fosil Burung Garuda, Terumbu Karang, Panorama Senja	Kabupaten Kaimana (Kaimana, Teluk Arguni, Buruway dan Teluk Etna)

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat. 2006.

Pengembangan pariwisata seperti layaknya pengembangan usaha lain, yakni harus mempertimbangkan selera pasar yang potensial menjadi demand. Produk-produk yang berorientasi pasar (Customer Oriented) dengan mempertimbangkan daya dukung sumberdaya dan lingkungan yang optimal akan mampu mencapai konsumen dan kualitas produk yang proposional serta mampu memberikan kontribusi pendapatan yang maksimal.

Beberapa peluang investasi untuk mengembangkan pariwisata Provinsi Papua Barat, antara lain:

1. Penataan obyek dan daya tarik wisata secara fisik untuk dikelola, dikemas dalam satu paket wisata;
2. Pendirian biro usaha perjalanan wisata, yang bekerjasama dengan pengelola tempat wisata;
3. Pendirian sarana penunjang pariwisata yang berupa hotel, dan restoran serta usaha lain yang berkaitan erat dengan industri pariwisata, seperti took souvenir, kerajinan dan lain-lain.

### 2.3.3. Infrastruktur

#### Transportasi

Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan dan integrasi wilayah. Infrastruktur transportasi dalam konteks pembangunan di Papua Barat mencakup transportasi jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut dan udara. Selain mengemban fungsi pelayanan public dan misi pembangunan daerah, transportasi juga berkembang sebagai industri jasa.

Fungsi pelayanan umum transportasi adalah melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil, serta untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sector-sector ekonomi daerah. Dengan demikian, pembangunan transportasi selayaknya diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, andal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau.

Papua Barat memiliki tantangan yang unik di bidang infrastruktur, yaitu kondisi geografis dibandingkan daerah manapun.

#### (1). *Prasarana Jalan*

Di Provinsi Papua Barat, transportasi jalan belum merupakan modal transportasi yang utama, khusus untuk menghubungkan antar kabupaten. Kendati demikian sebagian besar kabupaten di Papua Barat menggunakan jalan sebagai moda transportasi utama untuk menghubungkan antar distrik/kecamatan, kecuali Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten-kabupaten ini masih mengandalkan transportasi air (laut, sungai dan danau) sebagai moda transportasi utama.

Beberapa kabupaten/kota yang sebagian besar wilayahnya dapat dijangkau melalui transportasi darat adalah Kabupaten Manokwari, Sorong, Fak Fak dan Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten lain seperti Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Kaimana, wilayahnya sulit

dijangkau melalui darat, sehingga alternatif transportasi harus melalui laut atau udara. Secara khusus Kabupaten Raja Ampat hanya bisa di jangkau melalui transportasi laut. Pada umumnya kabupaten induk asesibilitasnya relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten pemekaran yang baru dibentuk terutama Raja Ampat dan Teluk Wondama.

Tabel 2.27-a. Panjang jalan menurut tingkat pemerintahan yang berwenang dan Kabupaten/ Kota (Km)

No.	Kabupaten/ Kota	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Jalan	Luas Daerah	Jumlah Pddk	Panjang Jln / Jumlah Pddk
1.	Fak Fak		263975	209900	473875	142320	95856	4.9436
2.	Sorong	90	121		211	7246	70081	0.0030
3.	Manokwari	237310	86000	706790	1030096	14676	143949	7.1560
4.	Kaimana	-	-	-	10	31771	17200	0.0006
5.	Sorong Selatan	-	-	-	158	42322	52299	0.0030
6.	Raja Ampat	-	-	-	7	11901	29248	0.0002
7.	Teluk Bintuni	-	-	3870	3870	18658	39886	0.0970
8.	Teluk Wondama	-	-	-	63	4996	14165	0.0044
9.	Kota Sorong	18	17	200.20	235.20	1105	141836	0.0017
	Jumlah	237418	350113	920760.2	1508525.20	274995	604520	12.2096

Sumber : Statistik Potensi Desa Papua Barat, 2005; dan Statistik Perhubungan Papua Barat, 2005

Panjang jalan berdasarkan tingkat kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat, bahwa Kabupaten Manokwari memiliki jalan paling panjang yakni 1.030.096 Km, dari panjang jalan yang ada di kabupaten lain (Tabel 2.27-a). Sedangkan panjang jalan berdasarkan status pemerintahan yang berwenang, bahwa jalan kabupaten adalah yang terpanjang yakni 92.0760,20 Km (61%) bila dibandingkan dengan jalan provinsi 350.113 Km (23%) dan jalan negara 237.418 Km (16%).

Panjang jalan di Provinsi Papua Barat hingga tahun 2005 tercatat 1.508.525.2 Km. Perbandingan total panjang jalan dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten dapat dilihat dalam Tabel 2.26. Berdasarkan panjang jalan dan penyebaran jumlah penduduk yang berdomisili pada masing-masing kabupaten relatif jarang.

Kabupaten yang sebagian besar aksesnya ke distrik dapat ditempuh melalui jalur transportasi darat adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak Fak dan Kabupaten Sorong Selatan walaupun masih ada sebagian distrik yang harus ditempuh melalui udara atau air. Sedangkan kabupaten lain seperti Teluk Wandama, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat dan Kaimana, masih banyak wilayahnya tidak dapat dijangkau melalui darat.

Ada empat kabupaten yang dapat ditempuh melalui darat walapun kondisi jalan raya masih dalam bentuk tanah dan dalam tahap pengerasan yakni Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Bintuni, demikian juga Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.

Kondisi jalan pada semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat masih dalam tahap pembangunan. Sebagai contoh, Kabupaten Teluk Bintuni sedang melakukan pembangunan jalan darat yang dapat menghubungkan Ibukota Kabupaten menuju SP, Kabupaten Sorong Selatan membangun jalan dari Teminabuan menuju Kampung Manelek, Bariat, Konda dan Distrik Seremuk serta beberapa distrik lainnya. Kabupaten Raja Ampat sedang melakukan pembukaan jalan dari Waisai menuju Teluk Mayalibit.

Tabel 2.27-b. Panjang jalan menurut tingkat permukaan dan Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Permukaan				Total
		Aspal	Kerikil	Tanah	Lain-Lain	
1.	Fak Fak	198,640	154,500	113,226	7,512	473,875.0
2.	Sorong	62	129	20	-	211.0
3.	Manokwari	439,786	346,550	243,760	16	1,030,096.0
4.	Kaimana	4		6	-	10.0
5.	Sorong Selatan	39	55	64	-	158.0
6.	Raja Ampat	3		4	-	7.0
7.	Teluk Bintuni	1	14	26	-	41.0
8.	Teluk Wondama	3	22	7	22	54.0
9.	Kota Sorong	170,28	19,10	45,13	0,7	235,21
Jumlah		638,538	501,270	357,113	7,550	1,504,452

*Kompilasi data, 2005*

Dari tiga kabupaten yang tersedia datanya, bahwa jenis permukaan jalan yang terpanjang adalah aspal yakni 638.538 Km, kemudian kerikil 501.270 Km, tanah 357.113 Km, dan lain-lain 7.550 Km.

*(2). Angkutan Sungai, Danau dan Peyeberangan (ASDP)*

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) merupakan jembatan mengapung yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus, kegiatan angkutan feri yang mengangkut penumpang dan barang melalui sungai dan perairan dengan rute tetap dan terjadwal.

*(3). Transportasi Laut*

Transportasi laut mempunyai peranan sangat penting pada perekonomian Papua Barat. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar mobilitas orang dan barang, baik yang masuk maupun yang keluar dari wilayah Papua Barat masih menggunakan transportasi laut. Selain itu sebagian besar mobilitas orang dan barang di wilayah Papua Barat, baik antar kabupaten maupun antar distrik masih menggunakan moda transportasi laut. Berikut gambaran tentang transportasi laut di Papua Barat.

Pada tahun 2005, di Provinsi Papua Barat terdapat empat pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Fak Fak dan Pelabuhan Kaimana. Keempat pelabuhan utama ini digunakan sebagai pelabuhan komersil. Selain itu, terdapat

pelabuhan kecil yang melayani pelayaran perintis di daerah-daerah kepulauan, pesisir pantai maupun sungai-sungai, yaitu pelabuhan perintis Wasior, Windesi, Oransbari, Saukorem, Sausapor, Saonek, Kalobo, Teminabuan, Inantawan, Bintuni, Babo dan Kokas.

Untuk kepentingan mobilisasi penumpang dan barang melalui laut di Provinsi Papua Barat tersedia fasilitas pelabuhan umum yang di miliki oleh PT (Persero). Jumlah arus kunjungan kapal dalam negeri menurut jenis pelayaran hingga tahun 2004 sebanyak 1.618.276 kunjungan. Dari jumlah arus kunjungan kapal tersebut pelabuhan yang paling banyak dikunjungi oleh angkutan laut adalah pelabuhan kota Sorong sebanyak 1.414.367 kunjungan yang diikuti oleh pelabuhan kota Manokwari sebanyak 154.343 kunjungan, dan Fak Fak sebanyak 49.566 kunjungan. Penumpang berangkat lebih banyak bila dibandingkan dengan penumpang tiba (tiba berjumlah 803.245 dan berangkat berjumlah 815.031) (Tabel 2.28

Tabel. 2.28. Jumlah kunjungan kapal, kapasitas dan penumpang menurut pelabuhan

No.	Pelabuhan	Kunjungan	Kapasitas	Penumpang		
				Tiba	Berangkat	Jumlah
1.	Fak Fak	389	374.126	28.216	21.350	49.566
2.	Manokwari	683	947.611	72.782	81.561	1.54.343
3.	Kota Sorong	2.961		702.247	712.120	1.414.367
Jumlah 2004		4.033	1.321.737	803.245	815.031	1.618.276
Jumlah 2005		2.842				

*Kompilasi data, 2005*

Kunjungan kapal pada tahun 2004 berjumlah 4.033, dan pada tahun 2005 berjumlah 2.842. Hal ini mengindikasikan kunjungan kapal mengalami penurunan sekitar 14,8%.

#### (4). *Transportasi Udara*

Transportasi udara memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dibandingkan moda transportasi lain, dan sangat cocok bagi wisatawan, pengusaha dan masyarakat. Karena keunggulan tersebut, saat ini transportasi udara menjadi moda transportasi alternative yang dengan cepat menghubungkan antar kabupaten dan antar distrik di Papua Barat.

Prasarana perhubungan udara utama di Provinsi Papua Barat adalah Lapangan Terbang Rendani di Manokwari, Domine Edward Osok dan Jefman di Sorong, Torea di Fak Fak dan Tarum di Kaimana, kelima lapangan terbang ini selain didarati oleh pesawat penerbangan perintis jenis Twin Otter juga dapat didarati pesawat jenis Fokker dan Boing. Sedangkan di Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Sorong Selatan hanya bisa didarati oleh pesawat jenis tertentu seperti Twin Otter.

Fasilitas angkutan udara yang tersedia di Papua Barat di Kabupaten Fak Fak jumlah pesawat yang berangkat dan datang tercatat 1.010 kali penerbangan dengan jumlah penumpang yang berangkat dan datang sebanyak 12.297 penumpang, Jefman-Sorong 2.811 kali penerbangan dengan jumlah penumpang yang berangkat dan datang sebanyak 94.164 penumpang, dan Sorong Kota 2.111 kali penerbangan dengan jumlah penumpang yang berangkat dan datang berjumlah 34.075 penumpang, serta Rendani-Manokwari 7.088 kali penerbangan dengan jumlah penumpang yang berangkat dan datang berjumlah 86.083

penumpang, selama tahun 2004. Sedangkan pada tahun 2005 jumlah pesawat yang berangkat dan datang mengalami penurunan pada ke empat pelabuhan udara tersebut.

Kompilasi data tahun 2004, bahwa kegiatan penerbangan baik yang keluar dan masuk daerah maupun yang hanya transit, untuk tujuan Sorong memiliki jumlah keberangkatan yang paling banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat sejumlah 41.292 penumpang, dan jumlah penumpang yang datang untuk tujuan Sorong juga memiliki nilai yang paling tinggi berjumlah 52.872 penumpang.

Untuk Kabupaten Fak Fak (Torea), kapasitas penerbangan yang berangkat dan datang masing-masing 505 kali penerbangan dan 505 kali keberangkatan, dengan memberangkatkan sebanyak 6.182 penumpang dan mendatangkan penumpang yang masuk daerah Fak Fak sebanyak 6.115 penumpang, baik domestik maupun mancanegara. Manokwari (Rendani) kapasitas penerbangan baik berangkat dan datang masing-masing 3.344 kali penerbangan dan 3.744 kali keberangkatan, dengan memberangkatkan sebanyak 40.132 penumpang dan mendatangkan penumpang yang masuk daerah Manokwari sebanyak 45.951 penumpang, baik domestik maupun mancanegara.

Pada tahun 2005, jumlah penerbangan dan penumpang transit khusus di Sorong Daratan mengalami peningkatan, karena telah difungsikannya Pelabuhan Udara Domine Edward Osok. Demikian juga dengan di Pelabuhan Udara Rendani Manokwari, pada tahun 2005 memiliki jumlah pesawat dan penumpang transit paling banyak yakni berjumlah 22.824 jika dibandingkan dengan semua kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat. Hal ini terjadi mungkin karena pengaruh kota Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat.

Secara umum banyaknya pesawat terbang dan penumpang yang berangkat, datang dan transit per pelabuhan udara yang ada di Papua Barat mengalami penurunan pada tahun 2005 jika dibandingkan pada tahun 2004 (Tabel 2.29).

Tabel 2.29. Banyaknya pesawat dan penumpang yang transit melalui pelabuhan udara

No.	Pelabuhan Udara	Penerbangan		Penumpang		Transit
		Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	
1.	Torea – Fak Fak	274	274	2.391	2.529	770
2.	Sorong - Jefman	125	124	7.127	4.887	2.810
3.	Manokwari-Rendani	611	567	11.580	10.201	22.824
4.	Kaimana					
5.	Sorong Selatan					
6.	Raja Ampat					
7.	Teluk Bintuni					
8.	Teluk Wondama					
9.	Kota Sorong	1.966	1.925	54.817	48.388	15.058
	Jumlah 2005	2.976	2.890	75.915	66.005	41.462
	Jumlah 2004	6.320	6.700	10.4874	121.745	43.773

*Kompilasi Data, 2004 dan 2005*

Demikian juga halnya dengan banyaknya bongkar muat bagasi, barang dan post dirinci berdasarkan pelabuhan udara mengalami penurunan pada semua pelabuhan udara, kecuali jumlah muat dari post yang mengalami peningkatan (Tabel 2.30).

Tabel 2.30. Banyaknya bongkar muat bagasi, barang dan post dirinci berdasarkan pelabuhan udara

Pelabuhan Udara	Bagasi		Barang		Post	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
Torea – Fak Fak	33.782	17.846	9.686	100.004	1.276	1.322
Sorong - Jefman	66.712	65.371	37.039	16.924	0	0
Manokwari-Rendani	111.713	106.872	29.574	45.472		
Kota Sorong	735.921	583.380	337.135	216.368	650	9.808
Jumlah 2005	948.128	773.469	413.434	288.768	1.926	11.130
Jumlah 2004	1.698.251	1.249.155	916.452	785.055	2.125	6.206

*Kompilasi Data, 2005*

### Perdagangan

Perusahaan perdagangan di Papua Barat menurut golongan usaha pada tingkat desa dan perkotaan, bahwa toko/warung/kios menduduki urutan tertinggi, kemudian koperasi Unit Desa (KUD) dan non KUD, Restoran/Rumah Makan, Hotel/Penginapan, dan Supermarket. Dari semua jenis usaha seperti: toko/warung/kios, KUD, dan non KUD sebagian besar berada di pedesaan, sedangkan yang lainnya lebih banyak tersebar di perkotaan, seperti Minimarket dan Supermarket (Tabel 2.31).

Tabel 2.31. Banyaknya perusahaan perdagangan menurut golongan usaha pada tingkat desa dan perkotaan

No	Kabupaten/ Kota	Super Market	Restoran/ Rumah Makan	Toko/ Warung/ Kios	Hotel/ Penginapan	Koperasi Unit Desa	Koperasi Non KUD
1.	Fak Fak	1	4	9	3	9	7
2.	Sorong		2	37		9	4
3.	Manokwari	3	8	69	7	14	7
4.	Kaimana		2	5	1		
5.	Sorong Selatan		2	52	2	1	2
6.	Raja Ampat	1		59	2		1
7.	Teluk Bintuni		1	20	3	7	16
8.	Teluk Wondama	1		11		1	
9.	Kota Sorong	5	11	22	10	3	4
Jumlah di Kota dan di Desa		11	30	284	28	44	41
Jumlah di Kota		9	25	41	21	8	8
Jumlah di Desa		2	5	243	7	36	33

*Kompilasi data, 2005.*

## Listrik

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Provinsi Papua Barat. Saat ini, peranan energi listrik lebih didominasi oleh energi listrik tenaga diesel, sedangkan pemanfaatan energi listrik tenaga mikro hidro masih sangat terbatas. Kapasitas mesin pembangkit listrik yang ada sekarang baru mencapai 72,92 megawatt. Oleh karena itu, kedepan perlu dikembangkan prasarana dan sarana energi listrik mikro hidro di Provinsi Papua Barat. Jumlah pembangkit tenaga listrik di Provinsi Papua Barat di tujuh kabupaten pada tahun 2004 adalah 141 KW, kapasitas terpasang adalah 46.051 KW, kemampuan mesin 35.456 KW, dan beban puncak sebesar 23.907 KW (Tabel 2.32).

Tabel 2.32. Banyaknya unit pembangkit tenaga listrik PLN, kapasitas terpasang, kemampuan mesin dan beban puncak menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Banyaknya (KW)	Kapasitas Terpasang (KW)	Kemampuan Mesin (KW)	Beban Puncak (KW)
1.	Fak Fak	28	7767	4506	2421
2.	Sorong	38	2302	2102	835
3.	Manokwari	43	12251	10501	6910
4.	Kaimana	12	2461	1762	639
5.	Sorong Selatan	-	-	-	-
6.	Raja Ampat				
7.	Teluk Bintuni	3	308	145	145
8.	Teluk Wondama				
9.	Kota Sorong	17	20962	16440	13600
	Jumlah	141	46051	35456	24550

Sumber : PLN Wilayah X Papua (Kompilasi data tahun 2004)

Jumlah tenaga listrik yang diproduksi pada tahun 2003 sebesar 128.698.061 KWH, yang dialirkan sebesar 125.739.848 KWH dan yang terjual sebesar 112.502.051 KWH. Pada tahun 2004 tenaga listrik yang diproduksi sebesar 139.843.301 KWH, yang dialirkan sebesar 136.509.977 KWH dan yang terjual sebesar 123.397.910 KWH (Tabel 2.33).

Tabel 2.33. Banyaknya tenaga listrik yang diproduksi, dialirkan dan yang dijual menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Produksi (KWH)		Terjual (KWH)		Dialirkan (KWH)	
		Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2003	Tahun 2004
1.	Fak Fak	14.298.812	13.446.125	14.298.812	13.351.934	13.273.924	11.851.211
2.	Sorong	5.121.999	2.109.409	5.011.999	2.109.409	2.762.159	1.922.986
3.	Manokwari	31.965.985	35.897.172	29.129.947	34.762.383	27.893.385	31.269.343
4.	Kaimana		4081602		4.081.602		3.650.886
5.	Sorong Selatan						
6.	Raja Ampat						
7.	Teluk Bintuni		237.360		237.360		214.632
8.	Teluk Wondama						
9.	Kota Sorong	77.311.265	84.071.633	77.299.090	82.047.289	68.572.583	74.488.852
	Jumlah	128.698.061	139.843.301	125.739.848	136.589.977	112.502.051	123.397.910

Sumber : PLN Wilayah X Papua (Kompilasi data tahun 2003 dan 2004)

Berdasarkan data pada Tabel 2.33, jika dilihat pada tahun 2003 dan 2004 terjadi penambahan baik produksi, terjual dan yang dialirkan. Jika dipersentasikan berarti ada penambahan atau kenaikan sebesar rata-rata 0,04 KWH. Kabupaten/Kota yang paling banyak memproduksi, mengalirkan dan menjual adalah Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, dan Kabupaten Sorong.

### Air Bersih

Perusahaan air bersih pada tahun 2003 terdiri dari 4 perusahaan, 3 perusahaan induk dan 1 perusahaan cabang. Pada tahun 2004 mengalami penurunan yaitu hanya 3 perusahaan induk, sedangkan perusahaan cabang tidak difungsikan lagi. Tetapi kapasitas potensial pada tahun 2004 mengalami kenaikan dari 268 liter/detik menjadi 297 liter/detik. Sedangkan kapasitas efektif sama dengan tahun 2003 yakni 144 liter/detik.

Sumber air bersih yang digunakan berasal dari air sungai dan mata air pegunungan. Total produksi air sebanyak 6.458.801 M<sup>3</sup>, yang bersumber dari sungai sebanyak 3.525.554 M<sup>3</sup> dan dari mata air pegunungan sebanyak 2.926.767 M<sup>3</sup> dan dari sumber lainnya sebanyak 6.480 M<sup>3</sup>.

Tabel 2.34. Produksi air bersih menurut Kabupaten/Kota dan sumber air yang digunakan (M<sup>3</sup>)

No.	Kabupaten/ Kota	Sumber Air			Jumlah
		Sungai	Mata Air	Lainnya	
1.	Fak Fak	-	1.453.623	-	1.453.623
2.	Manokwari		1.131.000		1.131.000
3	Kota Sorong	3.525.554	342.144	6.480	3.874.178
Jumlah		3.525.554	2.926.767	6.480	6.458.801

Sumber : Statistik Air Bersih PAPUA BARAT, 2004.

Pada Tabel 2.34 nampak bahwa persentase sumber air bersih berasal dari sungai mencapai 54,6%, mata air 45,3% dan sumber lainnya 0,1%.

Tabel 2.35. Banyaknya pelanggan air minum yang disalurkan dirinci menurut jenis pelanggan per Kabupaten/Kota (M<sup>3</sup>)

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Pelanggan					Jumlah
		Sosial	Non Niaga	Niaga	Industri	Khusus	
1	Fak Fak	69.720	667.353	73.464	5.544	42.864	858.945
2	Sorong	39.270	10.907	1.138.497	8.427	33.230	1.230.331
3	Manokwari	29.490	617.272	19.200	5.607	16.240	687.809
9	Kota Sorong	39.210	1.074.515	196.905	8.427	53.365	1.372.422
Jumlah		177.690	2.370.047	1.428.066	28.005	145.699	4.149.507

Sumber : PDAM, Papua (Kompilasi data tahun 2004)

Pada tahun 2004 jumlah air minum yang disalurkan sebanyak 4.149.507 M<sup>3</sup>. Non niaga merupakan pelanggan terbesar yakni 2.370.047 dan niaga sebesar 1.428.066, sedangkan sosial 177.690 dan industri 28.005 dan yang khusus adalah 145.699 Artinya non niaga merupakan pengguna air terbanyak di susul oleh niaga, sedangkan dari kategori sosial, industri dan khusus relatif lebih kecil.

Penggunaan air bersih yang terbanyak di Papua Barat adalah Kota Sorong dari semua jenis pelanggan yang di salurkan, disusul Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak Fak, dan Kabupaten Manokwari.

### Perbankan

Selain prasarana dan sarana perhubungan serta energi, yang tak kalah pentingnya adalah prasarana dan sarana perbankan. Jumlah kantor cabang bank yang beroperasi di Provinsi Papua Barat kurang lebih berjumlah 60 kantor cabang. Dari sejumlah bank yang beroperasi, jumlah terbesarnya adalah kantor Bank Pemerintah, yang terdiri dari Bank Pemerintah Pusat (BNI, BRI) sebesar 56,49 persen dan Bank Pembangunan Daerah (Bank Papua) sebesar 26,72 persen, sisanya sebesar 16,79 persen adalah bank-bank yang dikelola oleh swasta (Bank Mandiri, Bank Danamon)

Tabel 2.36. Jumlah Perbankan yang berada di Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Bank Umum	BPR
1.	Fak Fak	2	
2.	Sorong	2	
3.	Manokwari	7	1
4.	Kaimana	1	
5.	Sorong Selatan	1	
6.	Raja Ampat	1	
7.	Teluk Bintuni	3	
8.	Teluk Wondama	1	
9.	Kota Sorong	6	1
Jumlah di Kota dan di Desa		24	2
Jumlah di Kota		19	2
Jumlah di Desa		5	-

*Kompilasi data, 2005.*

### 2.3.4. Investasi dan Dunia Usaha

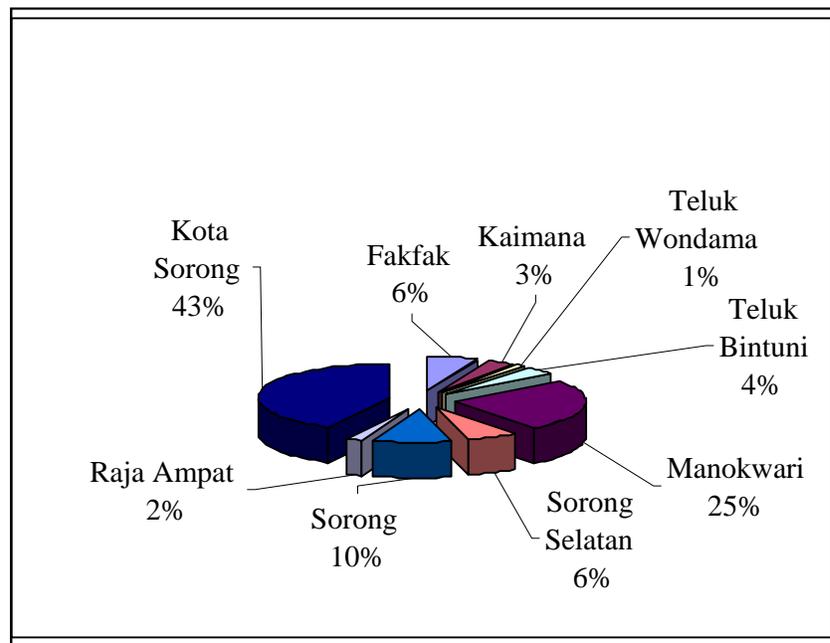
#### (a). Distribusi Usaha Menurut Wilayah

Menurut sensus ekonomi tahun 2006, jumlah unit usaha di Papua Barat sebanyak 46.153 unit. Jumlah tersebut sudah mewakili 13 sektor usaha yang terdiri dari sector pertambangan/penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan konstruksi; perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; transportasi, pergudangan dan komunikasi; perantara keuangan; real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan social; jasa kemasyarakatan, social budaya; dan jasa perorangan yang melayani rumah tangga.

Kota Sorong merupakan wilayah dengan jumlah unit usaha terbesar mencapai 42,18 % sementara kabupaten yang memiliki jumlah unit usaha paling sedikit adalah Kabupaten Teluk Wondama.

Apabila perkembangan usaha dibagi berdasarkan jenis lapangan usaha, maka Provinsi Papua Barat masih didominasi oleh sektor perdagangan diikuti dengan jasa transportasi, pergudangan dan komunikasi.

Listrik, Gas dan Air Minum merupakan jenis lapangan usaha yang masih sangat kurang, diikuti oleh jasa perorangan yang melayani rumah tangga dan perantara uang. Listrik, Gas dan Air minum masih belum menjadi kebutuhan mendasar sehingga permintaannya masih sangat kurang meskipun ketiga jenis usaha tersebut sangat dibutuhkan dalam suatu industri. Khusus untuk jasa perantara uang, jumlah bank maupun lembaga keuangan lainnya terbilang masih sangat kurang sehingga perlu peningkatan. Lembaga keuangan perlu dirangsang untuk menjadi penggerak modal usaha bagi masyarakat di Papua Barat.



Gambar 2.11. Sebaran Usaha Menurut Kabupaten/Kota

Sangat menarik jika melihat sebaran usaha menurut lapangan usaha di tiap kabupaten/kota di Papua Barat. Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari merupakan wilayah yang paling banyak memiliki usaha menurut lapangan usaha. Baik Kota Sorong maupun Kabupaten Manokwari merupakan dua wilayah penting atau metropolis di Papua Barat. Jumlah lapangan usaha di kedua wilayah ini mempengaruhi jumlah keseluruhan provinsi. Keduanya memiliki kemiripan dalam hal jumlah lapangan usaha paling dominan yakni perdagangan besar dan eceran serta transportasi, pergudangan dan komunikasi.

Perbedaan jenis lapangan usaha di kedua wilayah ini hanya terletak pada jumlah lapangan usaha paling sedikit. Kabupaten Manokwari masih kurang dalam usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga, sedangkan Kota Sorong kurang pada usaha

listrik, gas dan air minum. Kondisi Kota Sorong mencerminkan gambaran Provinsi Papua Barat secara keseluruhan, itu menunjukkan bahwa kota Sorong merupakan wilayah utama di Papua Barat. Wilayah-wilayah yang tertinggal dalam jumlah lapangan usaha adalah kabupaten/kota yang dimekarkan di luar wilayah pemekaran Kota Sorong termasuk Kabupaten Raja Ampat. Dapat disimpulkan pula bahwa daerah-daerah pemekaran di wilayah Kota Sorong masih termasuk daerah yang maju (*urban area*) dan daerah-daerah pemekaran selain dari daerah induk Kota Sorong merupakan daerah tertinggal (*rural area*) dari segi iklim investasi yang kondusif.

#### (b). Identifikasi Industri

Perkembangan investasi di Papua Barat masih sulit dideteksi karena keterbatasan data yang dimiliki, tetapi perlu dikemukakan di sini guna perencanaan pembangunan yang terarah. Indikator kuat terhadap iklim investasi yang kondusif ditunjukkan oleh perkembangan industri, baik industri besar, sedang maupun industri kecil. Industri besar yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja minimal 100 orang, industri sedang yaitu industri yang menyerap tenaga kerja 20 – 99 orang dan industri kecil adalah industri dengan jumlah tenaga kerja 5 – 19 orang, serta industri rumah tangga adalah industri yang jumlah tenaganya kurang dari 5 orang.

Industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja berada di Kabupaten Sorong meskipun dari segi jumlah unit usaha sedikit lebih rendah dari Kabupaten Manokwari. Nilai investasi dan nilai produk pun lebih besar Kabupaten Sorong daripada Kabupaten Manokwari. Hal menarik lainnya adalah jumlah investasi yang besar di Kabupaten Fakfak tidak berada pada lapangan usaha produktif yang memberikan nilai keuntungan tinggi. Dalam hal ini, Kabupaten Manokwari jauh lebih produktif daripada Fakfak yang nilai investasinya mencapai hampir 3 trilyun rupiah.

Khusus untuk industri kecil, Kabupaten manokwari menyerap lebih banyak tenaga kerja, menggunakan modal yang beda sedikit dengan Kota Sorong tetapi menghasilkan keuntungan yang tinggi. Di Manokwari, jumlah usaha kecil paling banyak daripada daerah lain, menggunakan tenaga kerja kedua terbesar setelah Kota Sorong.

Untuk industri kecil logam, mesin dan elektronika, paling berkembang di Kabupaten Sorong dan menyerap 881 tenaga kerja. Nilai investasi dari industri kecil logam, mesin dan elektronik paling besar di Kabupaten sorong. Nilai investasi tidak menjamin keuntungan yang lebih baik sehingga keuntungan usaha di bidang ini yang lebih efisien berada di Kabupaten Manokwari.

Industri besar dan sedang di Provinsi Papua Barat juga masih didominasi oleh Kabupaten Sorong dan Manokwari. Jumlah unit usaha terbanyak ada di Kabupaten Sorong dan Fakfak, demikian pula jumlah tenaga kerja terbesar terdapat di kedua kabupaten tersebut. Meskipun menyerap tenaga kerja dan nilai investasi yang besar, Kabupaten Manokwari lebih efisien daripada Kabupaten Fakfak. Industri besar dan sedang lebih baik dikembangkan di Manokwari dengan pertimbangan efisiensi. Untuk industri besar dan menengah kimia, pulp dan kertas lebih banyak dibangun di Kabupaten Fakfak (termasuk Kaimana). Industri ini masih sangat kurang di Papua Barat dibanding lapangan usaha lain. Industri besar dan menengah kimia, pulp dan kertas (ISIC 33) lebih baik dikembangkan di Kabupaten Sorong karena besarnya nilai produksi. Berbeda dengan industri ISIC 33, industri besar dan menengah agrobisnis, hasil hutan dan laut lebih tepat dikembangkan di Kabupaten Sorong dengan

---

---

pertimbangan jumlah unit usaha terbesar, menggunakan tenaga kerja terbanyak, investasi yang besar dan mempunyai prospek keuntungan.

Industri ISIC 38 lebih berpotensi dikembangkan di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, sebaliknya kurang baik dikembangkan di Fakfak. Industri ini sama sekali tidak terdapat di kabupaten Manokwari sebagai salah satu wilayah penting di Papua Barat. Industri besar dan menengah ISIC 32 baru berkembang di Kabupaten Sorong. Selain di Kabupaten Sorong, tidak ada di daerah lainnya.

Setelah pengembangan industri, perlu dipikirkan pemasaran dari tiap industri tersebut sehingga mendatangkan nilai tambah yang lebih baik. Selain di Teluk Bintuni, daerah-daerah pemekaran dari Kabupaten Sorong telah mengembangkan orientasi usaha ke arah ekspor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ekspor per tahun daerah-daerah tersebut yang konsisten baik melalui pelabuhan udara maupun pelabuhan laut.

Perkembangan investasi yang paling berkembang berada di Kabupaten Manokwari. Data tahun 2004 bisa saja mengindikasikan pergerakan usaha ke Manokwari setelah penetapan wilayah ini sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat. Meskipun demikian, semangat berinvestasi tersebut tergolong ke dalam usaha kecil dan menengah seperti tergambar pada jenis surat ijin usaha penjualan. Kabupaten Sorong dan Kota Sorong tetap menjadi pilihan investasi besar. Pilihan tersebut dapat diterima karena aksesibilitas yang lebih baik dari wilayah lain khususnya melalui pelabuhan laut.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kegiatan investasi di Papua Barat mengalami pemusatan (aglomerasi) pada daerah-daerah perkotaan dengan fasilitas prasarana dan sarana yang lebih baik. Oleh sebab itu, jenis kegiatan usaha yang dilakukan sebagian besar berupa kegiatan jasa, terutama perdagangan, transportasi dan komunikasi, dan jasa-jasa lainnya. Kegiatan usaha industri pengolahan lebih bersifat menunjang sector pertambangan dan pengolahan hasil-hasil ekstraktif sumberdaya alam seperti kehutanan dan perikanan.

Tampaknya ada sesuatu yang salah dengan kegiatan investasi di Papua Barat. Perusahaan-perusahaan perikanan skala besar yang pada dasawarsa 1990-an menjadi andalan ekspor dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Papua Barat seperti PT. Usaha Mina di Sorong, PT. Bintuni Mina Raya di Teluk Bintuni dan PT. Galaxy di Manokwari saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Hanya PT. Avona Mina Raya di Kaimana yang sampai saat ini masih beroperasi. Perusahaan pengolahan tepung sagu terbesar (PT. Sagindo Sari Lestari) di Kabupaten Teluk Bintuni juga sudah menghentikan operasinya sejak tahun 2003

## 2.4. Hukum dan Kelembagaan

### 2.4.1. Kapasitas Kelembagaan

Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pemerintahan yang berintikan pada pelayanan masyarakat bergantung pada kapasitas kelembagaan yang menjalankannya terutama lembaga pemerintah yang menangani bidang regulasi dan teknis. Di samping kelembagaan pemerintah, juga terdapat kelembagaan non pemerintah yang turut serta melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga non pemerintah ini merupakan potensi mitra kerja lembaga pemerintah yang efektif apabila kapasitas kelembagaannya diberdayakan. Kapasitas lembaga non pemerintah ini telah di bahas pada sub. **bab. 2.2. Sosial Budaya.**

Kapasitas lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanannya baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal dan masih perlu diberdayakan. Peran dan fungsi lembaga pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator dan akselerator pembangunan masih lemah. Belum optimalnya peran dan fungsi pelayanan lembaga-lembaga pemerintah tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kapasitas lembaga baik ditinjau dari segi jenis kelembagaan, struktur organisasinya maupun kualitas sumberdaya manusia yang mengelolanya.

Paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sedang melembaga saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah memnuntut kapasitas lembaga pemerintah dengan karakteristik akomodatif, partisipatif, regulatif, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan akuntabilitas tinggi. Keseluruhannya menuntut untuk melakukan revitalisasi terhadap struktur organisasi pemerintahan, mekanisme dan pengalokasian sumberdaya baik sumberdaya fisik, manusia maupun sumberdaya alam dan modal.

Ditinjau dari aspek struktur organisasi pemerintahan, pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan organisasi yang efisien (hemat struktur dan kaya fungsi). Jumlah Lembaga Pemerintah yang terdapat di empat Kabupaten dan satu Kota disajikan pada Tabel 2. 37.

**Tabel 2. 38. Jumlah lembaga pemerintah pada empat kabupaten dan satu kota**

Kabupaten/Kota	SETDA	BADAN	DINAS	KANTOR	SET.DPR	SET.KPU	JUMLAH
Manokwari	1	6	10	2	1	1	21

Sorong Kota	1	3	10	5	1	1	21
Sorong Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-
Fakfak	1	9	12	6	1	1	30
Kaimana	1	2	7	2	1	1	14
Teluk Bintuni	1	2	10	2	1	1	17
Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-	-
Raja Ampat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>103</b>

Struktur lembaga pemerintah dalam bentuk Badan, Dinas dan Kantor jumlahnya masih bervariasi dan kemungkinannya terdapat beberapa lembaga yang belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemungkinan lain adalah terdapat lembaga yang memiliki tugas dan fungsi rangkap. Oleh karenanya perlu direstrukturisasi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal daerah dengan asas efisiensi seperti yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003.

#### 2.4.2. Pembuatan Hukum

Salah satu peran dan fungsi pemerintah adalah sebagai regulator. Perangkat peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang terkait dengan Pemerintahan daerah telah tersedia. Khusus untuk Provinsi Papua, termasuk Papua Barat memiliki kekhususan regulasi tingkat pusat melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sekalipun payung hukum berupa Undang-Undang tersedia, namun belum dapat digunakan secara operasional untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan regulasi di daerah. Masih dibutuhkan seperangkat seperangkat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) sebagai regulasi operasional dari Undang-Undang tersebut. Berkaitan dengan pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar hukum penyelenggaraan berbagai kebijakan dan regulasi pembangunan di daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota masih sangat lemah. PERDA baik Perdasus maupun Perdasi yang dibutuhkan sebagai Payung Hukum pelaksanaan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 belum tersedia. Pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) belum mampu menetapkan perangkat regulasi hukum yang mampu mendorong penyelenggaraan Undang-Undang Otonomi khusus tersebut. Beberapa peraturan daerah (perda) yang diterbitkan di tingkat Kabupaten/kota, lebih banyak mengatur tentang retribusi dimasing-masing daerah Kabupaten/kota. Tetapi PERDA tingkat

Provinsi (Perdatus maupun Perdasi), yang dapat dijadikan payung hukum bagi Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) masing-masing belum tersedia. Akibatnya setiap Kabupaten/Kota menerbitkan PERDA sesuai dengan kebutuhan spesifik dan mendesak bagi mereka. Sebagai gambaran, jumlah Peraturan Daerah dan isi PERDA yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 2. 39.

Tabel 2. 39. Jumlah dan Isi Peraturan Daerah (PERDA) pada Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah dan Isi PERDA			
		Retribusi/Pajak	Perizinan	Lain-lain	Total
1.	Manokwari	23	2	14	39
2.	Sorong Kabupaten	-	-	-	-
3.	Sorong Kota	18	-	1	19
4.	Teluk Wondama	-	-	-	-
5.	Teluk Bintuni	1	-	3	4
6.	Raja Ampat	-	-	-	-
7.	Fak-Fak	6	2	1	9
8.	Kaimana	2	-	1	3

Productivitas pemerintah daerah dalam pembuatan PERDA tergolong rendah. Isi dari PERDA umumnya terkait dengan Retribusi dan Pajak. Hal ini dapat dimaklumi karena sumber pendapatan asli daerah utamanya adalah retribusi dan pajak. Regulasi tentang perizinan paling sedikit diterbitkan karena adanya ketidakpastian kewenangan antara pusat dan daerah dan antara provinsi dan kabupaten/kota. Khusus regulasi terkait dengan investasi belum tersedia. Hal ini dimungkinkan karena belum adanya regulasi payung yang dikeluarkan oleh Provinsi terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam.

### 2.4.3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagai salah satu upaya untuk pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotismo (KKN) sebagai wujud nyata dalam menegakkan pemerintahan yang baik masih jauh dari harapan. Berbagai pelanggaran hukum di berbagai aspek kehidupan masih belum dapat ditangani secara jujur dan konsekuen. Penegakan hukum telah menjadi ungkapan yang lazim, namun dalam pelaksanaannya kesadaran Publik atas penegakan hukum masih rendah. Penegakan hukum adalah tugas yang amat berat yang harus dipikul oleh pemerintah daerah. Ambiguitas berbagai regulasi yang tersedia serta kurangnya regulasi baru yang mampu mengatur berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan kegiatan pembangunan merupakan permasalahan kompleks yang harus dihadapi dan dipecahkan. Penyadaran hukum baik kepada penegak hukum maupun kepada masyarakat harus terus diupayakan yang pada

akhirnya penegakan hukum benar-benar dapat dijalankan secara tertib dan konsekuen'

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan issue terbesar dalam pemerintahan. Adanya KKN tidak saja disebabkan oleh perilaku yang menyimpang (moral hazard), baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dari suatu individu, tetapi juga disebabkan oleh belum adanya sistem dan institusi yang memberikan struktur insentif untuk mencegah dan menanggulangi KKN seperti penegakan hukum (law enforcement), pelaksanaan pengawasan pemerintahan dan pembangunan yang ketat, belum optimalnya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan, serta belum optimalnya pengawasan masyarakat dalam pembangunan. Adanya KKN ini mengakibatkan adanya pemborosan terhadap biaya pembangunan, tidak optimalnya *output-output* pembangunan, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan lebih jauh lagi akan merusak tatanan masyarakat yang mengarah pada kehidupan yang tanpa aturan.

Di bidang ketentraman dan ketertiban, terlihat bahwa masih lemahnya penegakan aturan-aturan hukum (PERDA) yang disebabkan karena lemahnya pengawasan dan penegakan aturan itu sendiri dari pihak Pemerintah Daerah serta rendahnya kesadaran masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan informasi. Hal ini dapat diindikasikan dari banyaknya kasus-kasus pemalangan terhadap fasilitas-fasilitas publik milik Pemerintah Daerah karena tuntutan ganti rugi tanah. Disamping itu guna meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu adanya pengkajian dan revisi terhadap produk-produk hukum (PERDA) yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, atau perlu dibentuk produk-produk hukum baru yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendorong pengembangan dunia usaha.

Desentralisasi kekuasaan dan wewenang merupakan salah satu indikator dalam pemerintahan yang baik (*good governance*), yang tidak saja direalisasikan dalam tatanan sistem pemerintahan nasional dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah Kabupaten kepada pemerintahan di bawahnya seperti distrik dan kampung. Otonomi kampung sebagai salah satu upaya yang dilaksanakan dalam kerangka pembangunan partisipatif baru mulai dilaksanakan dan menghadapi berbagai kendala dan tantangan seperti adanya resistensi dari berbagai pihak yang menyangsikan kemampuan masyarakat kampung untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan sumberdayanya sendiri, serta adanya kendala-kendala lain yang bersifat teknis.

#### 2.4.4. Sinkronisasi Program Nasional, Local dan Sektor

Wilayah Provinsi Papua Barat sudah lama berkembang di Tanah Papua. Pengembangan wilayah dan investasi di wilayah Kepala Burung, berlangsung, baik lewat program Pemerintah Pusat, Provinsi Papua maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai Provinsi yang muda, sudah barang tentu tidak dapat mengabaikan semua yang sudah dilakukan, namun demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan cita-cita dan aspirasi serta kondisi yang berkembang.

Sejak diberlakukannya UU No. 01 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 06 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka urusan investasi dalam Pemerintahan Negara mendapat perhatian yang khusus. Ditingkat nasional, sehubungan dengan berlakunya UU No 01 Tahun 1967 tersebut diatas, dibentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA), dengan tugas memberikan

saran/nasehat kepada Presiden mengenai PMA. Dengan ditetapkannya UU no 6 Tahun 1968, dibentuk Panitia Tekhnis Penanaman Modal (PTPM) dengan tugas studi dan Evaluasi permohonan Investasi. UU no 1 tahun 1967 kemudian direvisi dan ditambah suplemen menjadi UU no. 11 Tahun 1970 tentang P.M.A dan UU no. 6 Tahun 1968 diamandemen dan ditambah suplemen menjadi UU no. 12 Tahun 1970 tentang PMDN.

Pada tahun 1973 dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan peleburan dari pada kedua organisasi tersebut diatas. BPKM dikatakan merupakan wahana pelayanan Investasi (Investment Service Agency), BKPM berfungsi :

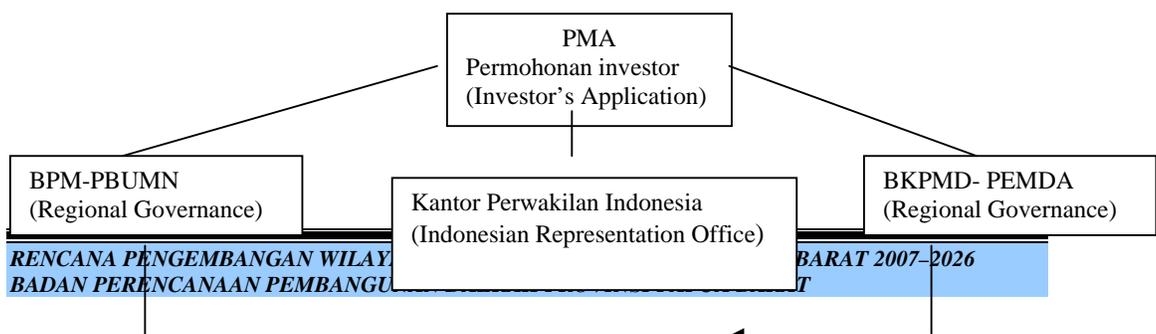
1. Menjajagi (asses) dan merumuskan kebijakan investasi nasional;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi investasi
3. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan aktivitas investasi
4. Mengkoordinasikan perkembangan aktivitas investasi diantara organisasi kedinasan dalam pemerintahan
5. Melaksanakan pelayanan manajerial dalam perencanaan, dan administrasi organisasi, SDM, keuangan, arsip, kodifikasi, supplier dan logistik

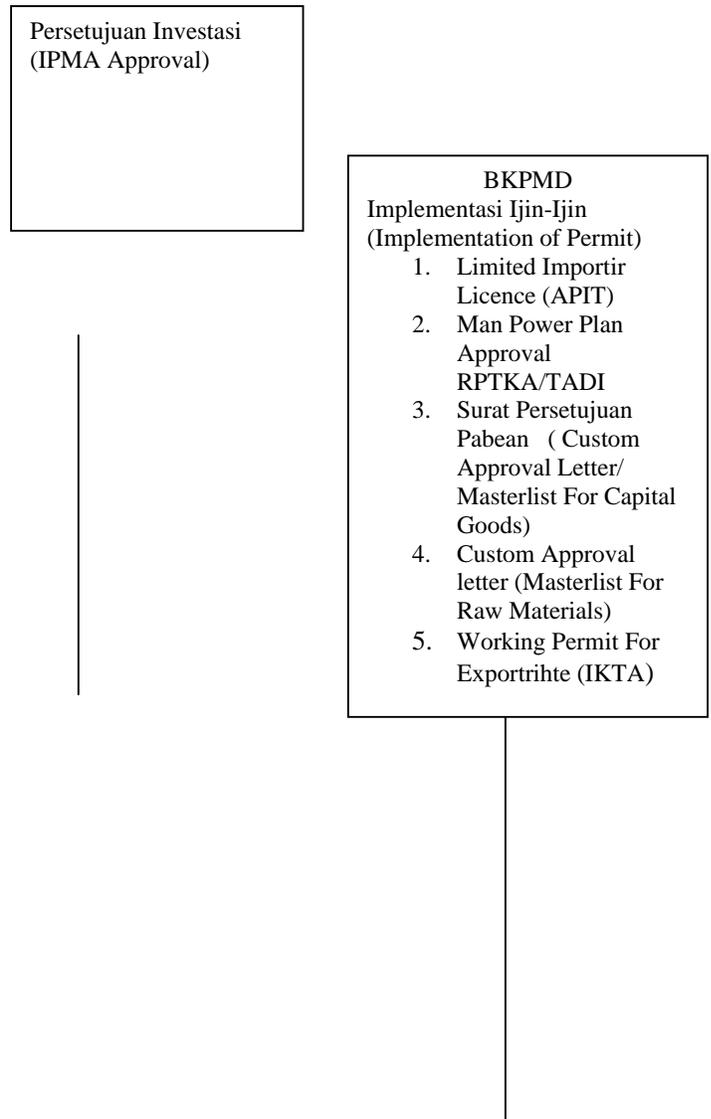
Kemudian dengan Keppres 26 tahun 1980 dibentuk di tingkat provinsi Badan Koordinasi Penanaman Modal di Daerah (BKPMMD). Badan ini mendapat nama yang bermacam-macam setelah berlakunya UU no 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU no 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah. Khusus di provinsi Papua namanya menjadi Badan Investasi dan Promosi Daerah (BPID). Di provinsi Papua Barat, tugas ini dirangkap oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal (DPPK2PM). Untuk masa kedepan, diharapkan BPID Propinsi Papua Barat dapat dibentuk dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya.

Tahap-tahap pendekatan investasi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pengajuan dan Prosedur Pemberian Persetujuan pada Kantor Perwakilan RI ( untuk Calon PMA), Kantor Menteri Negara/ BPM = PBUMN, dan BKMD (atau BPID).
2. Pengajuan dan Prosedur Pemberian Persetujuan pada Kawasan Berikat (Bonded zone). Belum ada Kawasan Berikat di Tanah Papua. Pemerintah provinsi Papua Barat dapat mengusulkan kawasan Arar di Sorong untuk menjadi Kawasan Berikat dengan melengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan.
3. Pengajuan dan Prosedur Pemberian persetujuan pada Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET). Di Tanah Papua baru ada satu, yakni KAPET BIAK.

Peran lembaga-lembaga terkait dalam program investasi tercermin dalam Bagan alir Gambar 2. 31.





Gambar 2.31. Pengaturan dan Peran Lembaga-lembaga Terkait Dalam Proses Investa

Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD), dan Perusahaan Swasta murni diharapkan dapat berperan penting dalam investasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Terdapat banyak kelembagaan Usaha yang sifatnya nasional dan ada pula yang sifatnya lokal. Kamar Dagang dan Industri ( KADIN ) yang sifatnya nasional, tetapi terbentuk juga KADIN Provinsi dan KADIN Kabupaten/Kota. Hampir semua pengusaha yang formal adalah anggota KADIN. Organisasi lain yang bersifat nasional

tetapi terbentuk juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia ( GAPENSI ) dan Asosiasi Rekanan Dagang Indonesia ( ARDIN ). Kedua organisasi ini menghimpun pengusaha yang menunggu proyek-proyek pemerintah, terkait dengan pelaksanaan anggaran setiap tahun. Organisasi yang sifatnya lokal di Provinsi Irian Jaya Barat adalah Asosiasi Pengusaha Asli Papua ( ASPA atau ASPAP ). Organisasi inipun masih bersifat seperti anggota GAPENSI dan ARDIN, yakni menunggu proyek-proyek pemerintah. Organisasi yang menghimpun semua pengusaha sejenis dan bersifat nasional adalah Pengusaha Hotel Republik Indonesia ( PHRI ) dan mempunyai organisasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Walaupun secara nasional bidang industri telah menggeser posisi pertanian, tetapi untuk Provinsi Papua Barat, bidang pertanian masih merupakan sektor yang unggul. Penguatan badan-badan usaha di bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memberi pendapatan bagi sebagian besar keluarga dan tenaga kerja di Provinsi IJB diharapkan dapat difasilitasi oleh pemerintah melalui kebijakan yang tepat dan pelayanan yang prima. Iklim Usaha yang harus diciptakan menurut UU RI No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 6 meliputi (a) pendanaan; (b) persaingan; (c) prasarana; (d) informasi; (e) kemitraan; (f) perizinan usaha; dan (g) perlindungan.

Peranan Bank sangat penting dalam menunjang investasi dan pengembangan wilayah melalui kucuran kredit untuk pengolahan sumberdaya alam maupun untuk pembangunan prasarana yang dibutuhkan. Di semua Kabupaten di IJB telah ada Bank dalam jumlah dan intensitas pelayanan yang beragam. Bank Papua misalnya, telah ada dan beroperasi diseluruh kabupaten, termasuk kabupaten- kabupaten baru seperti Raja-Ampat dan Teluk Wondama. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga telah beroperasi di sebagian besar, bahkan telah mempunyai unit-unit di tingkat distrik-distrik potensial, terutama di daerah-daerah transmigrasi. BNI dan Bank Danamon serta Bank Mandiri hanya beroperasi di kota-kota besar seperti Sorong, Manokwari dan Fakfak. Selain Bank, lembaga keuangan lain yang biasa memberikan pinjaman kepada pengusaha UMKM di Provinsi IJB adalah Perusahaan Pegadaian dan sebuah anak perusahaan dari perusahaan asuransi PT Jasa Rahardja, yakni Jasa Rahardja Putra. Persyaratan kredit yang diberikan dipandang sangat mudah sehingga kedua perusahaan ini umumnya diserbu para pengusaha kecil. Kredit yang diberikan, berkisar dari ratusan ribu sampai dengan puluhan juta. PT Jasa Rardja Putra bahkan sudah biasa memberikan pinjaman tanpa jaminan. Lembaga-lembaga usaha tersebut merupakan mitra kerja pemerintah dalam bidang investasi yang perlu diberdayakan serta disinkronisasi peran dan fungsi masing-masing. Pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong agar lembaga tersebut mampu berperan dan pengembangan ekonomi kerakyatan di wilayah ini melalui regulasi dan insentif investasi yang memadai.

Kasus-kasus tuntutan masyarakat adat pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah hukum adatnya perlu dilindungi dan dikelola dengan bijaksana. Tuntutan-tuntutan tersebut bila tidak dikendalikan hanya akan menghambat program investasi di wilayah ini. Di Papua Barat berdasarkan jumlah bahasa, terdapat sekitar 54 suku yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan wilayah adatnya. Hingga kini, upaya untuk memetakan tanah-tanah adat yang ada, baru sebatas wacana. Belum ada tindakan nyata dan penyisihan anggaran untuk menunjang kegiatan ini.

Pendekatan mikro spasial berorientasi pada manusia dan masyarakat setempat (komunitas) dan kebutuhannya (people-centered) pada kawasan tertentu atau ekosistem

tertentu. Disini, system sosial budaya dan ekosistem alami dimana komunitas tersebut bertempat tinggal sangat diperhatikan dalam penyusunan program pengembangan. Satuan kawasan mikro dalam pendekatan ini adalah kecamatan dan subjek sasaran adalah masyarakat desa di kecamatan yang bersangkutan. Memperhatikan sistem sosial-kebudayaan tidak berarti mempertahankan sifat tertutup, tradisional, dan nilai-nilai lama yang menghambat perubahan. Sesungguhnya harus diciptakan perubahan melalui introduksi unsur baru atau melakukan modifikasi unsur pada sistem yang lama agar sistem sosial budaya lama itu dapat menjadi lebih dinamis, produktif dan efisien.

Dalam upaya menciptakan kesetimbangan dan keserasian pendekatan makro-sektoral dan mikro-spasial, telah dirumuskan konsep lima pola kemitraan sebagai berikut :

1. Pola hubungan tenaga kerja; selama ini pengusaha selalu memberikan alasan bahwa masyarakat setempat tidak siap atau tidak memiliki ketrampilan yang memadai untuk direkrut dalam usaha yang berkembang di daerah ini; dalam hal inilah pemerintah daerah atau pengusaha diwajibkan menyiapkan dana jauh hari sebelum kegiatan investasi berlangsung untuk melatih, dengan prioritas pada tenaga potensial pada masyarakat adat pemilik sumber daya alam, agar dapat menguasai ketrampilan yang dibutuhkan sehingga tenaga kerja itu dapat terserap dalam usaha yang dikembangkan.
2. Pola perusahaan inti-rakyat (PIR); penduduk setempat diikut sertakan sebagai peserta plasma; bahkan, sebagai kasus di kabupaten Jayapura, dengan Surat Keputusan Bupati, masyarakat adat mendapat premi sekian Rupiah dari harga per kg setiap tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen dan dijual ke pabrik.
3. Pola pemegang saham masyarakat pemilik sumber daya alam (equity participation); masyarakat adat tidak menjual tanahnya, akan tetapi nilai tanah dihitung sebagai saham mereka dalam usaha yang dikembangkan; hal ini berarti mereka berhak ikut serta dalam Dewan Komisaris perusahaan dan memperoleh dividen dari keuntungan usaha yang bersangkutan; sudah barang tentu, risiko kerugian juga perlu diatur dengan baik bersama. Cara ini pernah dicoba dalam pembangunan hotel Marau di Biak, tetapi tidak diatur secara tuntas, bahkan hotel itu terus merugi dan akhirnya ditutup.
4. Pola bapak angkat-anak angkat; perusahaan besar menyisihkan sebagian dari labanya sebagai modal kerja atau modal investasi disertai supervise usaha serta menjamin pemasaran produk kepada satuan-satuan usaha kecil milik anggota masyarakat adat.
5. Pola pengembangan masyarakat pedesaan disekitar pusat pertumbuhan; masyarakat dibimbing dalam meningkatkan jumlah dan mutu produksi pertaniannya, dan hasilnya dapat dibeli kembali oleh perusahaan besar, atau masyarakat lain di pusat pertumbuhan sebagai substitusi bahan yang selama ini diimport, atau juga untuk dieksport. Cara ini sudah dicoba di daerah Timika oleh Freeport, namun belum ada hasil yang nyata.

Dengan pola kemitraan demikian diharapkan konflik vertikal maupun horizontal antar stakeholders investasi di wilayah ini dapat ditekan pada tingkat minimal dan pemberdayaan masyarakat lokal (masyarakat adat) secara bertahap tetapi pasti dapat digiring ke arah kemandirian.

